



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG



**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi dokumen laporan hasil kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Tanjungpandan, Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG



**H. M. HENIR CAYA, S.E., M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 196509041990031004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	- 1 -
DAFTAR ISI.....	- 2 -
BAB I PENDAHULUAN .....	- 3 -
I.1 Latar Belakang .....	- 3 -
2 Dasar Hukum .....	- 4 -
I.3 Maksud dan Tujuan.....	- 6 -
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH .....	- 7 -
II.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung.....	- 7 -
II.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	- 20 -
II.3 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	- 36 -
II.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....	- 86 -
II.5 Penghargaan .....	- 86 -
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BELITUNG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BELITUNG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022.....	- 94 -
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .....	- 98 -
BAB V PENUTUP.....	- 99 -

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran (LKPJ ATA) Tahun 2023 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2023 Bupati Belitung berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Belitung. LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2023.

LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2023 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Belitung. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Belitung, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Belitung.

Sekretariat Daerah sebagai pengampu urusan unsur pendukung urusan pemerintahan dan urusan pertanahan berkewajiban menyampaikan LKPJ Perangkat Daerah kepada Bupati Belitung sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun



sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif

## **2 Dasar Hukum**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.
29. Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023:
30. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Belitung.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

#### **I.3.1 Maksud**

Penyusunan LKPJ Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Kerja, sehingga dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sekretariat Daerah sebagai pelaksana urusan pertanahan dan unsur pendukung urusan pemerintahan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

#### **I.3.2 Tujuan**

Penyusunan LKPJ Sekretariat Daerah bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama Tahun Anggaran 2023 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

## BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH

### II.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Belitung merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Terdapat 20 (duapuluh) Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD, namun yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel II.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Satuan	Baseline 2022	Target 2023	Realisasi	Penanggung Jawab	Ket
1.	Opini BPK		WTP	WTP	n/a	Setda BPKAD Inspektorat	Data 2023 belum rilis oleh BPK RI
2.	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	BB	BB	Inspektorat Setda	
3.	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung		B	BB	B	Setda Inspektorat Bappeda	
4.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	86,88	88	88,28	Sekretariat Daerah	

*Sumber: Sekretariat Daerah, data diolah tahun 2023*

Pada uraian di atas, dapat dilihat capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung yang diampu oleh Sekretariat Daerah terdiri dari 4 (empat) indikator dengan capaian tahun 2023 pada masing-masing indikator meliputi indikator Opini BPK yang belum tersedia capaiannya dikarenakan masih menunggu rilis resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi telah mencapai target dengan realisasi “BB” dari target yang ditetapkan “BB”. Pada indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target “BB” terealisasi “B” dan capaian indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi 88,28% dari target 88%.



## 1. Opini BPK

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4) efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion* dan Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pemerintah Kabupaten Belitung selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan melalui laporan keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan Kabupaten Belitung pada tahun 2022 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan capaian opini BPK tahun 2023 masih dalam proses evaluasi dan belum dirilis secara resmi oleh BPK Republik Indonesia. Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung pada periode 2019-2023 sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung**

Tahun	Opini Hasil Audit
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	n/a*

\*menunggu hasil audit BPK RI, Tahun 2023

Pada data diatas diketahui bahwa capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Belitung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah WTP pada periode 2020 sampai dengan 2022. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dengan opini hasil audit BPK adalah WDP Sementara capaian untuk tahun 2023 masih menunggu hasil audit dari BPK RI. Diharapkan pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Belitung dapat mempertahankan capaian kinerja. Dalam upaya mempertahankan kinerja dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban APBD. Selain itu dengan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. WTP bukanlah tujuan akhir, namun yang lebih penting adalah wujud nyata pembangunan yang bisa dirasakan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Belitung.

## 2. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari empat tema yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi). Sehingga untuk mengetahui gambaran tingkat kemajuan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas maka dapat dilihat melalui capaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023. Laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi didalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung tahun 2023 tercapai sebesar 75,14 atau berpredikat “BB”. Capaian ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu predikat/kategori “BB”. Dalam upaya mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan kebijakan untuk penguatan Reformasi Birokrasi sebagaimana sasaran didalam Reformasi Birokrasi yaitu terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang professional.

Berikut capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2023:

**Tabel II.3**  
**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
	I. Pemenuhan	20	9,49
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	6,46
	III. Reform	30	9,85
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>25,81</b>
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,27
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10	9,14
	3. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,55
	4. Kinerja Organisasi	10	6,94
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40</b>	<b>31,90</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)</b>	<b>100</b>	<b>57,71</b>

Sumber data: LHE KemenPAN dan RB, tahun 2023

**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Belitung Tahun 2023**

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
<b>1</b>	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1,88	1,88
			Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	4,39
		Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	99,62	1,99
			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,8
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,2	2,56
			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	1,5	1,5
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	63,52	2,54
			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	1	0,5
			Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	93,22	2,33
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	3	1,5
			Indeks Kualitas Kebijakan	2,5		
			Indeks Reformasi Hukum	2,5	45,61	1,14
			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,12	1,06
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	72,4	1,81
			Indeks Sistem Merit	4	252,5	2,46
			Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,89	1,17
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	88,87	1,33		

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
		Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3,11	5,6
			Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	98	1,96
			Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	57,14	2,9
			Opini BPK	5	5	5
			Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80,1	3,2
			Indeks BerAkhlaq	4	61,6	2,46
			Survei Penilaian Integritas	10	76,61	7,66
			Survei Kepuasan Masyarakat	8	89,33	7,15
		Koefisien	Koefisien	10		
	<b>Total RB General</b>					<b>64,89</b>
<b>2</b>	<b>RB Tematik</b>	<b>Strategi Pelaksanaan RB Tematik</b>	<b>Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)</b>	0,4	0,28	0,28
			Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,28	0,28
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4		
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
			Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,27	0,27
			Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	54,61	0,23
			Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6		
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6		
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	100	0,42
			Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6		
		Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,5	1,5
			Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,61	1,61
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3		
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,8	2,8
			Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2,46	2,46
	<b>Total RB Tematik</b>					<b>10,25</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (RB General dan RB Tematik)</b>					<b>75,14</b>

Sumber data: Bagian Organisasi-Setda, data diolah

### Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	A-		Memuaskan dengan catatan
4.	BB	>70-80	Sangat Baik
5	B	>60-70	Baik
6	CC	>50-60	Cukup
7	C	>30-50	Kurang
8	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023

Capaian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2022 yang dilakukan oleh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencapai nilai 57,71 dengan predikat “CC” yang terdiri dari nilai komponen pengungkit sebesar 25,81 dan nilai komponen hasil sebesar 31,90. Sedangkan hasil evaluasi tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun tahun 2022 dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat perubahan komponen penilaian. Namun berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung mencapai 75,14 dengan predikat “BB” atau tercapai 100% dari target “BB” dengan nilai komponen RB general sebesar 64,89 dan RB tematik sebesar 10,25.

Dalam upaya peningkatan dan penguatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024 dan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso yang ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi nasional, serta bersifat *mandatory*. Kegiatan utama reformasi birokrasi *mandatory* ditetapkan sebagai berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Nilai SAKIP
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*

No	Kegiatan Utama	Indikator
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Khusus Kementerian/Lembaga)
		Indeks Pengelolaan Aset (Khusus Kementerian/Lembaga)
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*
		Employee Branding*
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Indeks Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Belitung menetapkan 5 (lima) tema Reformasi Birokrasi tematik sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan investasi
3. Digitalisasi pemerintahan
4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
5. Pengendalian inflasi



### 3. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian PANRB perlu melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Belitung. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2023 mencapai 63,52 dan berpredikat “B”. Capaian ini belum sesuai dengan target Pemerintah Kabupaten Belitung yang menargetkan kategori BB. Namun, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah dan penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Perkembangan dan pelaksanaan SAKIP Kabupaten Belitung yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB sebagai berikut:

**Tabel II.4**  
**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung**  
**Tahun 2022 - 2023**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,68	22,40
2.	Pengukuran Kinerja	30	15,26	16,16
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,84	10,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,20	14,71
	<b>Nilai Hasil evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>60,98</b>	<b>63,52</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber: Hasil Evaluasi AKIP Kemendagri Tahun 2023

### Nilai angka dan Persepsi Indeks AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 mencapai nilai 63,52 dengan kategori “B”. Walaupun secara kategori/predikat capaian nilai SAKIP Kabupaten Belitung belum meningkat, namun secara kuantitatif capaian kinerja pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,54 poin dibandingkan tahun 2022 dengan nilai sebesar 60,98. Dari 4 (empat) komponen yang dinilai, komponen perencanaan kinerja yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya yaitu sebesar 1,72 poin atau terealisasi sebesar 74,67% dari bobot penilaian. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penataan asset oleh Perangkat Daerah yang belum optimal dan juga kurangnya Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Belitung terkait pengelolaan/pengamanan Barang Milik Daerah
2. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal
3. Kompetensi aparatur yang masih kurang karena belum optimalnya pengelolaan manajemen aparatur
4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan) atau kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan untuk meraih opini WTP, Indeks Reformasi Birokrasi dan peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Belitung
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diarahkan pada pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
3. Adanya penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi saat ini diantaranya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Kabupaten Belitung)

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara layanan untuk dapat melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan melalui Survey Kepuasan Masyarakat. Dengan dilaksanakannya survey kepuasan terhadap masyarakat atas kinerja pelayanan penyelenggara pelayanan dapat mendorong penyelenggara pelayanan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif . sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belitung mengeluarkan Surat Bupati Nomor:000.8.3.4/19/VIII/2023 perihal Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Capaian nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

**Tabel II.5**  
**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**  
**Tahun 2022 dan 2023**

No	Organisasi Perangkat Daerah	IKM			
		2022		2023	
		Nilai	Kategori	Nilai	kategori
1	Sekretariat Daerah	92,91	Sangat Baik	93.32	Sangat Baik
2	Seretariat DPRD	87,62	Baik	88.91	Sangat Baik
3	Inspektorat	86,14	Baik	-	-
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85,64	Baik	86.85	Baik
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	79,22	Baik	86.12	Baik
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	89,01	Sangat Baik	89,39	Sangat Baik
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,82	Baik	86.43	Baik
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,74	Sangat Baik	92.55	Sangat Baik

No	Organisasi Perangkat Daerah	IKM			
		2022		2023	
		Nilai	Kategori	Nilai	kategori
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian	92,56	Sangat Baik	88,87	Sangat Baik
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,98	Baik	89,22	Sangat Baik
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86,77	Baik	89,26	Sangat Baik
12	Dinas Kesehatan	96,57	Sangat Baik	98,71	Sangat Baik
13	Dinas Pehubungan	87,29	Baik	88,35	Sangat Baik
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	90,10	Sangat Baik	95,04	Sangat Baik
15	Dinas Pariwisata	87,46	Baik	84,61	Baik
16	Dinas Perikanan	91,25	Sangat Baik	97,62	Sangat Baik
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	85,98	Baik	88,91	Sangat Baik
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayan Masyarakat dan Desa	89,30	Sangat Baik	84,05	Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	84,25	Baik	85,64	Baik
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86,97	Baik	88,51	Sangat Baik
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	88,97	Sangat Baik	89,12	Sangat Baik
22	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	85,40	Baik	86,67	Baik
23	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	84,28	Baik	82,73	Baik
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93,07	Sangat Baik	-	-
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92,85	Sangat Baik	91,05	Sangat Baik
26	Satuan Polisi Pamong Praja	80,21	Baik	87,06	Baik
27	Kecamatan Tanjungpandan	85,48	Baik	86,54	Baik

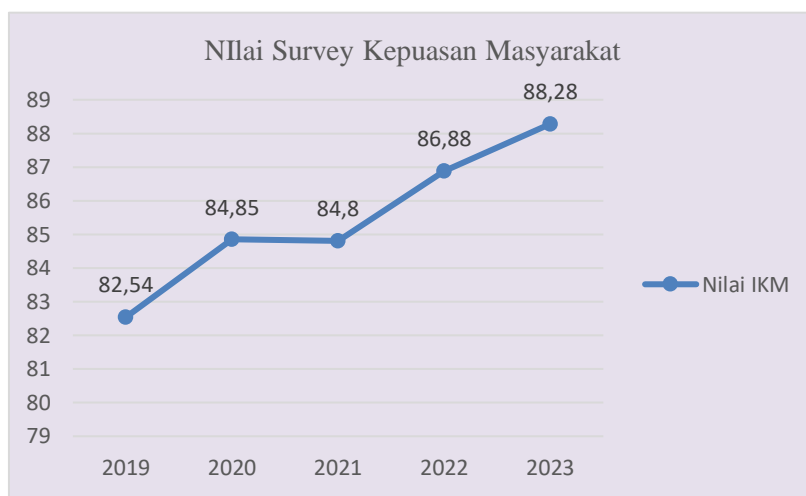
No	Organisasi Perangkat Daerah	IKM			
		2022		2023	
		Nilai	Kategori	Nilai	kategori
28	Kecamatan Badau	92,18	Sangat Baik	91.45	Sangat Baik
29	Kecamatan Sijuk	78,63	Baik	88.10	Baik
30	Kecamatan Membalong	83,84	Baik	89.32	Sangat Baik
31	Kecamatan Selat Nasik	85,90	Baik	82.49	Baik
32	Kelurahan Kota	87,05	Baik	88.71	Sangat Baik
33	Kelurahan Parit	88,06	Baik	88.96	Sangat Baik
34	Kelurahan Kampung Damai	83,65	Baik	82.37	Baik
35	Kelurahan Paal Satu	84,53	Baik	85.34	Baik
36	Kelurahan Pangkal Lalang	84,31	Baik	84.74	Baik
37	Kelurahan Tanjung Pendam	80,25	Baik	85.29	Baik
38	Kelurahan Lesung Batang	88,80	Sangat Baik	88.41	Sangat Baik
39	RSUD DR. H. Marsidi Judono	85,96	Baik	88.22	Baik
40	Puskesmas Tanjungpandan	82,21	Baik	82.34	Baik
41	Puskesmas Air saga	83,74	Baik	85.20	Baik
42	Puskesmas Perawas	86,43	Baik	89.84	Sangat Baik
43	Puskesmas Sijuk	89,31	Sangat Baik	90.45	Sangat Baik
44	Puskesmas Badau	90,87	Sangat Baik	88.03	Baik
45	Puskesmas Membalong	87,71	Baik	98.98	Baik
46	Puskesmas Selat Nasik	81,42	Baik	81.95	Baik
47	Puskesmas Tanjungbinga	90,08	Sangat Baik	85.24	Baik
48	Puskesmas Simpang Rusa	82,38	Baik	89.94	Sangat Baik
	<b>RATA-RATA</b>	<b>86,88</b>	Baik	<b>88,28</b>	Baik

Sumber : Bagian Organisasi-Setda, Tahun 2023

**Tabel II.6**  
**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Kabupaten Belitung 2020-2023**

Tahun Pelaksanaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
2019	82.54
2020	84.85
2021	84.80
2022	86,88
2023	88,28

*Sumber: Laporan SKM Kab.Belitung Tahun 2020-2023, diolah*



Gambar 2.1 Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 tercapai sebesar 88,28 atau kategori “B” (Baik). Capaian menunjukkan tren meningkat sebesar 1-2 poin pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggara pelayanan telah meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun capaian nilai survey kepuasan masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan, terdapat faktor penghambat dalam upaya peningkatan kinerja agar lebih maksimal, yaitu dari 48 (empat puluh delapan) Perangkat Daerah pelaksana SKM terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang belum dapat dinilai hasil SKM yang telah dilakukan yaitu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Inspektorat. Sedangkan faktor pendorong pelaksanaan SKM Kabupaten Belitung adalah Perangkat Daerah konsisten dalam memberikan pelayanan sesuai dengan unsur pelayanan yang harus dipenuhi dan mempertahankan kinerja unsur pelayanan yang sudah baik.



## II.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian indikator kinerja perangkat daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Belitung melaksanakan unsur pendukung urusan pertanahan dan urusan pemerintahan Tahun 2023 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.7**

### Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2022	2023	2022	2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi		BB	BB	CC	BB
2.	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung		BB	BB	B	B
3.	Nilai Komponen Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung		30	31	25,1	26.41
4.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra	persen	100	100	66,67	83,33
5.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	persen	100	100	77,78	66,67
6.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum	persen	100	100	40	n/a
7.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		3.60	3.61	3.72	3.73

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung dan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

#### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari empat tema yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi). Sehingga untuk mengetahui gambaran tingkat kemajuan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas maka dapat dilihat melalui capaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023. Laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi didalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung tahun 2023 tercapai sebesar 75,14 atau berpredikat “BB”. Capaian ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu predikat/kategori “BB”. Dalam upaya mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan kebijakan untuk penguatan Reformasi Birokrasi sebagaimana sasaran didalam Reformasi Birokrasi yaitu terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang professional. Berikut capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2023:

**Tabel II.8**  
**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Belitung Tahun 2022**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
	IV. Pemenuhan	20	9,49
	V. Hasil Antara Area Perubahan	10	6,46
	VI. Reform	30	9,85
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>25,81</b>
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
	5. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,27
	6. Kualitas Pelayanan Publik	10	9,14
	7. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,55
	8. Kinerja Organisasi	10	6,94
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40</b>	<b>31,90</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)</b>	<b>100</b>	<b>57,71</b>

Sumber data: LHE KemenPAN dan RB, tahun 2023

**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Belitung Tahun 2023**

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
<b>1</b>	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1,88	1,88
			Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	4,39
		Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyerhanaan Struktur Organisasi	2	99,62	1,99
			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyerhanaan Birokrasi	2	2	0,8
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,2	2,56

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	1,5	1,5
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	63,52	2,54
			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	1	0,5
			Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	93,22	2,33
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	3	1,5
			Indeks Kualitas Kebijakan	2,5		
			Indeks Reformasi Hukum	2,5	45,61	1,14
			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,12	1,06
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	72,4	1,81
			Indeks Sistem Merit	4	252,5	2,46
			Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,89	1,17
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	88,87	1,33
		Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3,11	5,6
			Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	98	1,96
			Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	57,14	2,9
			Opini BPK	5	5	5
			Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80,1	3,2
			Indeks BerAkhlak	4	61,6	2,46
			Survei Penilaian Integritas	10	76,61	7,66
			Survei Kepuasan Masyarakat	8	89,33	7,15
		Koefisien	Koefisien	10		
	<b>Total RB General</b>					<b>64,89</b>
<b>2</b>	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,28	0,28
			Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,28	0,28
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4		
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
			Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,27	0,27
			Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	54,61	0,23
			Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6		
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6		
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	100	0,42
			Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6		

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
		Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,5	1,5
			Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,61	1,61
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3		
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,8	2,8
			Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2,46	2,46
	<b>Total RB Tematik</b>					<b>10,25</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (RB General dan RB Tematik)</b>					<b>75,14</b>

Sumber data: Bagian Organisasi-Setda, data diolah

### Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	A-		Memuaskan dengan catatan
4.	BB	>70-80	Sangat Baik
5	B	>60-70	Baik
6	CC	>50-60	Cukup
7	C	>30-50	Kurang
8	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023

Capaian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2022 yang dilakukan oleh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencapai nilai 57,71 dengan predikat “CC” yang terdiri dari nilai komponen pengungkit sebesar 25,81 dan nilai komponen hasil sebesar 31,90. Sedangkan hasil evaluasi tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun tahun 2022 dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat perubahan komponen penilaian. Namun berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung mencapai 75,14 dengan predikat “BB” atau tercapai 100% dari target “BB” dengan nilai komponen RB general sebesar 64,89 dan RB tematik sebesar 10,25.

Dalam upaya peningkatan dan penguatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024 dan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso yang ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi nasional, serta bersifat *mandatory*. Kegiatan utama reformasi birokrasi mandatory ditetapkan sebagai berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
		Nilai SAKIP
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Khusus Kementerian/Lembaga)
		Indeks Pengelolaan Aset (Khusus Kementerian/Lembaga)
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*
		Employeer Branding*
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Indeks Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Belitung menetapkan 5 (lima) tema Reformasi Birokrasi tematik sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan investasi
3. Digitalisasi pemerintahan
4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
5. Pengendalian inflasi

## 2. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian PANRB perlu melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Belitung. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2023 mencapai 63,52 dan berpredikat “B”. Capaian ini belum sesuai dengan target Pemerintah Kabupaten Belitung yang menargetkan kategori BB. Namun, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah dan penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Perkembangan dan pelaksanaan SAKIP Kabupaten Belitung yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB sebagai berikut:

**Tabel II.9**  
**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung**  
**Tahun 2022 – 2023**

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,68	22,40
2.	Pengukuran Kinerja	30	15,26	16,16
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,84	10,25



4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,20	14,71
	<b>Nilai Hasil evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>60,98</b>	<b>63,52</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber: Hasil Evaluasi AKIP KemenpanRB Tahun 2023

#### Nilai angka dan Persepsi Indeks AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 mencapai nilai 63,52 dengan kategori “B” (Baik). Walaupun secara kategori capaian nilai SAKIP Kabupaten Belitung belum meningkat, namun secara kuantitatif capaian kinerja pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,54 poin dibandingkan tahun 2022 dengan nilai sebesar 60,98. Dari 4 (empat) komponen yang dinilai, komponen perencanaan kinerja yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya yaitu sebesar 1,72 poin atau terealisasi sebesar 74,67% dari bobot penilaian. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penataan asset oleh Perangkat Daerah yang belum optimal dan juga kurangnya Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Belitung terkait pengelolaan/pengamanan Barang Milik Daerah
2. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal
3. Kompetensi aparatur yang masih kurang karena belum optimalnya pengelolaan manajemen aparatur
4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan) atau kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan untuk meraih opini WTP, Indeks Reformasi Birokrasi dan peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Belitung
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diarahkan pada pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah,

meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

3. Adanya penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi saat ini diantaranya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

### 3. Nilai komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung

Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Belitung berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kinerja pencapaian SAKIP pada Sekretraiat Daerah Kabupaten Belitung pada komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Capaian kinerja kedua komponen tersebut pada tahun 2023 mencapai 26,41 (pengukuran kinerja sebesar 16,16 dan pelaporan kinerja sebesar 10,25).

Perkembangan capaian nilai komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja tahun pada tahun 2022-2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II.10**  
**Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja**  
**Kabupaten Belitung Tahun 2022 – 2023**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Sub Komponen	Nilai	
				2022	2023
1.	Pengukuran Kinerja	30	a. Keberadaan (6%) b. Kualitas (9%) c. pemanfaatan (15%)	15,26	16,16
2.	Pelaporan Kinerja	15	a. Keberadaan (3%) b. Kualitas (4,5%) c. Pemanfaatan (7,5%)	9,84	10,25
	<b>Nilai Hasil Eval</b>	<b>45</b>		<b>25,10</b>	<b>26,41</b>

Sumber: LHE PermenpanRB, Tahun 2022-2023

Pada data diatas diketahui bahwa capaian nilai komponen pengukuran kinerja dan pelaporan periode 2021-2023 terdapat perbedaan bobot dan sub komponen penilaian. Pada tahun 2021 bobot pengukuran kinerja sebesar 25 dan pelaporan kinerja sebesar 15. Sedangkan evaluasi kinerja pada tahun 2022 dan 2023 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan bobot pengukuran kinerja sebesar 30 dan pelaporan kinerja sebesar 15. Capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 26,41 meliputi capaian Pengukuran Kinerja sebesar 16,16% capaian ini meningkat sebesar 0,9% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan pada komponen pelaporan kinerja mencapai 10,25% dan meningkat sebesar 0,41% dibandingkan tahun 2022.

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja tahun 2023 antara lain:

1. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaporan kinerja
2. Belum optimalnya pembinaan kepada Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Belitung, sehingga pengukuran secara berjenjang pada Perangkat Daerah belum optimal yang berpengaruh terhadap capaian atau perkembangan kinerja belum dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat.

Faktor pendorong tercapainya kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

1. Tersedianya Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja sampai dengan eselon IV
  2. Penetapan Indikator Kinerja Individu sampai dengan level pelaksana dilaksanakan
  3. Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu
4. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra, merupakan indikator kinerja untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembangunan di bidang pembangunan dan kesra yaitu dengan membandingkan ketercapaian jumlah indikator sasaran RPJMD yang memenuhi target pada misi ke-1 terhadap jumlah indikator sasaran RPJMD pada misi ke-1. Pada RPJMD Kabupaten Belitung terdapat 6 (enam) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran per kapita dan Status desa “Maju”, dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel II.11**  
**Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Pemerintahan Dan Kesra**

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra	100%	83,33%

**Tabel II.12**  
**Indikator Sasaran RPJMD yang Mengacu pada Misi 1 RPJMD**

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	73,37	73,38	74,21	74,49
		Angka Kemiskinan	Persen	5,69	6,45	5,41	6,46

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,34	71,31	71,47	71,54
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,51	8,74	8,56	8,98
4	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rupiah	13.862.000	14.045.000	14.049.000	14.365.000
5	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	Status desa "Maju"	Desa	28	37	31	40
<b>Capaian Kinerja (%)</b>				66,67		83,33	

Sumber: Sekretariat Daerah, data diolah

Pada tabel diatas ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra tahun 2023 tercapai sebesar 83,33% dengan target 100%. Dari 6 (enam) indikator sasaran pada misi ke-1 RPJMD terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang telah mencapai target yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran per kapita, Status desa "Maju". Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja masih belum mencapai target yaitu indikator Angka Kemiskinan. Capaian kinerja tahun 2023 meningkat sebesar 16,66% dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan realisasi sebesar 66,67%.

- Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan, merupakan indikator kinerja untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembangunan di bidang perekonomian dan pembangunan yaitu dengan membandingkan ketercapaian jumlah indikator sasaran RPJMD yang memenuhi target pada misi ke-3 terhadap jumlah indikator sasaran RPJMD pada misi ke-3. Pada RPJMD Kabupaten Belitung terdapat 9 (Sembilan) indikator kinerja sasaran dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel II.13**  
**Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Dan Pembangunan**

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	100%	66,67%

**Tabel II.14**  
**Indikator Sasaran RPJMD yang Mengacu pada Misi 3 RPJMD**

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,0-4,4	5,71	4,4-5,1	5,75
2	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang	250.000	301.906	400.000	310.870
3	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	Persen	27,83	26,82	27,83	26,56
4	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi (dalam ribu)	Rupiah	83.070.832	94.183.859	85.562.956	96.586.234,124
		Nilai Omset Usaha Mikro (dalam ribu)	Rupiah	1.701.783.081	1.699.874.043	1.957.050.000	1.966.800.000
	Meningkatnya investasi	Nilai investasi (dalam juta)	Rupiah	3.507.975	3.707.410,25	5.023.529	4.799.309,25
5	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persen	57,96	58,85	59,94	64,90
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		68,37	69,25	68,88	68,90
7	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	15.50%	16.73	16	16,93
<b>Capaian Kinerja (%)</b>				77,78		66,67	

Sumber: Sekretariat Daerah, data diolah

Capaian sasaran strategis meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2023 tercapai 66,67%. Dilihat dari capaian kinerja, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target yaitu Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara), Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB dan Nilai investasi. Sedangkan capaian pada tahun 2022 terealisasi sebesar 77,78%. Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah mencapai target dan 2 (dua) indikator yang belum mencapai target yaitu Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB dan Nilai Omset Usaha Mikro.

6. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum, merupakan indikator kinerja untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembangunan di bidang administrasi umum yaitu dengan membandingkan ketercapaian jumlah indikator sasaran RPJMD yang memenuhi target pada misi ke-2 terhadap jumlah indikator sasaran RPJMD pada misi ke-2. Pada RPJMD Kabupaten Belitung terdapat 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ke-2 dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel II.15**  
**Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum**

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	100%	Belum tersedia

**Tabel II.16**  
**Indikator sasaran RPJMD yang Mengacu pada Misi 2 RPJMD**

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi		BB	CC	BB	BB
2	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	n/a
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung		BB	B	BB	B
3	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	75	71,56	76	n/a
4	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	87	86,88	88	88,28
<b>Capaian Kinerja (%)</b>				40		Belum tersedia	

Sumber: Sekretariat Daerah, data diolah

Capaian indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 dari 5 (lima) indikator kinerja yang mendukung misi ke-2 RPJMD, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang telah mencapai target yaitu Indeks Reformasi Birokrasi tercapai kategori “BB” dan Survey Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 88,28%. Pada indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung tercapai 63,52 dengan kategori “B” dan belum mencapai target “BB”. Capaian indikator kinerja Opini BPK pada tahun 2022 telah mencapai target yaitu WTP, sedangkan capaian tahun 2023 belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pada capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 belum mencapai target dengan realisasi 71,56% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, sedangkan capaian kinerja tahun 2023 belum tersedia dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Badan Kepegawaian Negara.

#### 7. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui gambaran kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah serta mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik terdapat 9 unsur penilaian pelayanan meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner manual dan menggunakan kuesioner online pada aplikasi SKM lewat tautan <https://skm.belitung.go.id>. Hasil survey ini digunakan sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung untuk melakukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Capaian survey kepuasan masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sebagai berikut:

**Tabel II.17**  
**Capaian Indikator Survey Kepuasan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Survey Kepuasan Masyarakat	3,61	3,73

**Tabel II.18**  
**Tabel Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan 2023**

No	Unsur Pelayanan	2022		2023	
		Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,724	Sangat Baik	3,695	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,644	Sangat Baik	3,727	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,605	Sangat Baik	3,633	Sangat Baik



No	Unsur Pelayanan	2022		2023	
		Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,766	Sangat Baik	3,897	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,724	Sangat Baik	3,688	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,705	Sangat Baik	3,731	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,720	Sangat Baik	3,703	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,697	Sangat Baik	3,667	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,897	Sangat Baik	3,887	Sangat Baik
<b>Nilai SKM</b>		<b>3,72</b>		<b>3,73</b>	
<b>Nilai Konversi SKM Sekretariat Daerah</b>		<b>92,21</b>		<b>93,32</b>	
<b>Mutu Pelayanan</b>		<b>A</b>		<b>A</b>	
<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>		<b>Sangat Baik</b>		<b>Sangat Baik</b>	

Sumber: Laporan SKM Sekretariat Daerah, Tahun 2023

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023 mencapai 3.73 dengan target 3,61 atau terealisasi sebesar 103% dengan kategori “SANGAT BAIK”. Pada 9 (sembilan) unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah yaitu unsur waktu pelayanan dengan nilai 3,633, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya unsur pelayanan ini meningkat sebesar 0,028 poin dari tahun 2022. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif mendapatkan nilai 3,897, hal tersebut dikarenakan setiap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersifat gratis bagi masyarakat. Selain itu unsur dengan nilai tertinggi yang lain adalah pada unsur penanganan pengaduan dengan nilai 3,887 dan unsur kompetensi pelaksanaan dengan nilai 3,731. Sehingga dengan capaian kinerja yang sudah sangat baik senantiasa berupaya mempertahankan kinerja semua unsur dan meningkatkan pelayanan dimasa mendatang.

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan 2 (dua) urusan dalam mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis yaitu urusan pertanahan dan unsur pendukung urusan pemerintahan yang didukung oleh program dan kegiatan. Pencapaian indikator kinerja program pada masing-masing urusan sebagai berikut:

A. Pencapaian indikator kinerja program terhadap penyelenggaraan urusan pertanahan tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel II.19**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2022	2023	2022	2023
1	Tertibnya Administrasi Tanah Garapan	Persen	-	100	-	20

Sekretariat Daerah sebagai pelaksana unsur pertanahan melaksanakan 1 (satu) program yaitu dengan indikator kinerja program yaitu Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator tertibnya administrasi tanah garapan. Capaian indikator program merupakan ketercapaian jumlah sengketa tanah garapan yang diproses terhadap jumlah tanah garapan yang bersengketa, dengan realisasi tercapai 20% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal ini menerima pengaduan/laporan dari masyarakat terkait dengan sengketa tanah yang terjadi antar masyarakat atau badan hukum/badan usaha, dan masyarakat dengan Pemerintah Daerah serta sebaliknya. Pada tahun 2023 terdapat 1 kasus sengketa tanah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dari target yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) kasus. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam rangka penyelesaian, yang memerlukan koordinasi dengan lintas sektor, antar pihak yang bersengketa, dan semua pihak pemangku kebijakan, sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas, serta masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pengelola dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi terhadap capaian kinerja.

- B. Pencapaian indikator kinerja program terhadap penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel II.20**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2022	2023	2022	2023
1	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100
2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Persen	75	75	64,59	73,59
3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100
4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	100
5	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persen	100	100	100	100
6	Penyelenggaraan Pemerintah Transparan dan Akuntabel	Persen	100	100	96,67	97,22
7	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung	Persen	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah, data diolah

Sekretariat Daerah sebagai pelaksana unsur penunjang melaksanakan 3 (tiga) program dengan target dan realisasi indikator kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan, capaian indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Faktor pendukung tercapainya kinerja dikarenakan adanya dukungan pimpinan dan koordinasi yang baik antar bagian dilindungi Sekretariat Daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan.
2. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah, target indikator sebesar 75 terealisasi sebesar 73,59. Capaian ini meningkat sebesar 9 poin dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi 64,59. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah berupaya meningkatkan profesionalitas dan kualitas ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah, dengan target 100% tercapai sebesar 100%. Capaian kinerja program didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan target 100% tercapai sebesar 100%. Capaian kinerja program didukung 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dengan target 100% tercapai sebesar 100%. Capaian kinerja program didukung 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

**b. Program Pemerintahan dan Kesra**

Indikator program yaitu penyelenggaraan pemerintah transparan dan akuntabel, merupakan capaian kinerja dengan menghitung jumlah realisasi indikator kinerja kegiatan terhadap target indikator kinerja kegiatan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 97,22% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Belum tercapainya kinerja program dikarenakan terdapat kegiatan capainnya belum mencapai target yaitu Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Hukum karena terdapat pelaksanaan sub kegiatan yang bersifat insidental terkait fasilitasi permasalahan hukum.

**c. Program perekonomian dan pembangunan**

Indikator program yaitu meningkatnya perekonomian dan pembangunan kabupaten belitung merupakan capaian kinerja dengan menghitung jumlah realisasi indikator kinerja kegiatan terhadap target indikator kinerja kegiatan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

**II.3 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**

**II.3.1 Urusan Wajib/Pilihan/Penunjang**

**II.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar/Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar/Pilihan**

**3.1.1.1. Pelaksanaan Urusan Pertanian**

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada unsur pertanian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel II.21  
Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>					
	<b>Kegiatan :</b>					
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Dokumen penyelesaian sengketa tanah garapan Outcome: Terfasilitasinya penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai ketentuan				
	Target/Anggaran			5 Berita Acara		77.002.900
	Capaian/Realisasi			1 Berita Acara		27.857.198
	%			20%		36,18%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Target/Anggaran			5 Berita Acara		77.002.900
	Capaian/Realisasi			1 Berita Acara		27.857.198
	%			20%		36,18%
	<b>Jumlah Anggaran</b>					
	<b>Anggaran</b>					<b>77.002.900</b>
	<b>Realisasi</b>					<b>27.857.198</b>
						<b>36,18%</b>

Pada tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan 1 (satu) program terkait unsur pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

### 1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

#### a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 5 berita acara terealisasi 1 berita atau 20%. capaian realisasi anggaran sebesar 36.18 % dengan pagu anggaran Rp. 77.002.900,- terealisasi Rp. 27.857.198,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat:

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat terbatas dalam melaksanakan kegiatan terkait urusan pertanahan
2. Terdapat proses mediasi yang belum dapat diselesaikan dikarenakan memerlukan waktu atau proses yang agak panjang antar pihak yang bersengketa yang pada akhirnya belum tuntas diselesaikan pada tahun 2023.

#### (1) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Dokumen administrasi tata pemerintahan target yang telah ditetapkan sebanyak 5 berita acara yang terealisasi 1 berita acara atau 20%. capaian realisasi anggaran sebesar 36,18 % dengan pagu anggaran Rp. 77.002.900,- terealisasi Rp. 27.857.198,-

Faktor pendorong:

Tersedianya Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat:

1. Minimnya sumber daya manusia (SDM)
2. Keterbatasan waktu penyelesaian yang memerlukan koordinasi dengan lintas sektor antara pihak yang bersengketa

**Tabel II.22**

#### Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanahan

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Sekretariat Daerah	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan pelaksanaan kegiatan terkait urusan di bidang pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyelenggarakan bimbingan teknis Urusan di bidang pertanahan untuk Aparatur</li> </ul>

No	Perangkat Daerah	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemerintahan Daerah, Desa, dan perwakilan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaksanakan kegiatan lapangan/peninjauan lapangan</li> <li>▪ Melakukan koordinasi lintas sektor</li> </ul>

### 3.1.1.2. Pelaksanaan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pertanahan

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel II.23**  
**Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan				
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah				
	Target/Anggaran		100%	100%	36.844.299.253	48.295.731.736
	Capaian/Realisasi		89,25%	100%	34.017.027.265,20	29.476.971.068
	%		89,25%	100%	92,33%	61,03 %
	<b>Kegiatan :</b>					

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Dokumen hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
		Outcome : Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan				
	Target/Anggaran		10 Dok	10 Dok	61.028.420	84.277.645
	Capaian/Realisasi		10 Dok	10 Dok	58.788.890	72.578.370
	%		100%	100%	96,33%	86,12%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Target/Anggaran		3 Dok	3 Dok	20.342.500	34.471.280
	Capaian/Realisasi		3 Dok	3 Dok	20.187.140	23.433.220
	%		100%	100%	99,24%	67,98%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	9.134.750	9.134.575
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	8.660.500	9.097.200
	%		100%	100%	94,81%	99,59%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	7.619.250	7.619.225
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	7.615.000	7.568.400
	%		100%	100%	99,94%	99,33%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	11.091.400	9.166.300
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	10.744.800	9.110.550
	%		100%	100%	96,88%	99,39%



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	7.819.250	7.819.025
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	7.815.250	7.759.400
	%		100%	100%	99,95%	99,24%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan valuasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Target/Anggaran		3 Lap	3 Lap	15.154.370	16.067.240
	Capaian/Realisasi		3 Lap	3 Lap	14.087.150	15.609.600
	%		100%	100%	92,96%	97,15%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output: Dokumen keuangan perangkat daerah				
		Outcome: Terpenuhiya dokumen keuangan sesuai peraturan				
	Anggaran		19 Lap	1 Lap	18.124.393.143	21.320.726.488
	Realisasi		19 Lap	1 Lap	17.635.378.149	18.192.430.216
	%		100%	100%	97,30%	85,33%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
	Target/Anggaran		113 org/bln	110 org/bln	17.957.572.013	21.154.850.527
	Capaian/Realisasi		113 org/bln	112 org/bln	17.477.148.221	18.035.126.111
	%		100%	100%	97,32%	85,25%
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Target/Anggaran		2 lap	2 lap	5.732.550	165.875.961
	Capaian/Realisasi		2 lap	2 lap	5.588.350	157.304.105
	%		100%	100%	97,48%	94,83%

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran				
	Target/Anggaran		17 Lap		161.088.580	
	Capaian/Realisasi		17 Lap		152.641.578	
	%		100%		94,76%	
	<b>Kegiatan :</b>					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Output: Terpenuhiya administrasi kepegawaian perangkat daerah				
		Outcome: Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah				
	Target/Anggaran		100%	100%	234.000.000	313.000.000
	Capaian/Realisasi		88,23%	82%	156.865.898	160.420.973
	%		88,23%	82%	67,04%	51,25%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				
	Target/Anggaran		1 paket	1 paket	55.000.000	60.000.000
	Capaian/Realisasi		1 paket	1 paket	52.000.000	54.500.000
	%		100%	100%	94,55%	90,83%
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
	Target/Anggaran		17 Orang	25 Orang	179.000.000	253.000.000
	Capaian/Realisasi		13 Orang	16 Orang	104.865.898	105.920.973
	%		76,47%	64%	58,58%	41,87%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output: Terpenuhiya administrasi umum perangkat daerah				
		Outcome: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
	Target/Anggaran		100%	100%	3.613.940.050	5.009.900.862
	Capaian/Realisasi		100%	100%	3.142.901.682	3.470.540.258

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	%		100%	100%	86,97%	69,27%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
	Target/Anggaran		1 Paket	1 Paket	200.000.000	200.000.000
	Capaian/Realisasi		1 Paket	1 Paket	198.999.250	198.977.500
	%		100%	100%	99,50%	99,49%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
	Target/Anggaran		2 paket	2 paket	165.292.050	260.281.962
	Capaian/Realisasi		2 paket	2 paket	163.615.340	244.281.000
	%		100%	100%	98,99%	93,85%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				
	Target/Anggaran		1 Paket	1 Paket	200.000.000	200.000.000
	Capaian/Realisasi		1 Paket	1 Paket	194.570.500	198.835.000
	%		100%	100%	97,29%	99,42%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
	Target/Anggaran		2 paket	2 paket	1.465.000.000	1.656.773.000
	Capaian/Realisasi		2 paket	2 paket	1.273.698.123	1.252.777.417
	%		100%	100%	86,94%	75,62%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
	Target/Anggaran		1 Paket	1 Paket	60.148.000	48.421.900
	Capaian/Realisasi		1 Paket	1 Paket	43.080.650	37.147.400
	%		100%	100%	71,62%	76,72%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	157.000.000	125.000.000
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	156.775.000	124.865.000
	%		100%	100%	99,86%	99,89%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Target/Anggaran		12 lap	12 lap	1.350.000.000	2.644.424.000
	Capaian/Realisasi		12 lap	12 lap	1.095.662.819	1.538.521.941
	%		100%	100%	81,16%	58,18%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	16.500.000	17.400.000
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	16.500.000	17.400.000
	%		100%	100%	100%	100%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output: Jenis barang milik daerah				
		Outcome: Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
	Target/Anggaran		17 Jenis	98 Unit	6.839.669.650	5.483.778.800
	Capaian/Realisasi		26 Jenis	98 Unit	6.641.336.494	4.806.261.400
	%		100%	100%	97,10%	87,65%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				
	Target/Anggaran			9 Unit		2.950.000.000
	Capaian/Realisasi			8 Unit		2.584.000.000
	%			88,88%		87,59%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				
	Target/Anggaran		7 Unit	90 Unit	64.000.000	196.500.000
	Capaian/Realisasi		1 Unit	90 Unit	50.000.000	155.700.000
	%		14,29%	100%	78,13%	79,24%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				
	Target/Anggaran		6 Unit	127 Unit	334.270.000	1.939.278.800
	Capaian/Realisasi		24 Unit	119 Unit	250.087.000	1.732.296.000
	%		100%	93,70%	74,82%	89,33%

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
	Target/Anggaran		2 Unit		6.119.199.650	
	Capaian/Realisasi		2 Unit		6.047.317.494	
	%		100%		98,83%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
	Target/Anggaran		2 Unit	2 Unit	322.200.000	398.000.000
	Capaian/Realisasi		2 Unit	2 Unit	293.932.000	334.265.400
	%		100%	100%	91,23%	83,99%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output: Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				
		Outcome: Kelancaran operasional kantor				
	Target/Anggaran		100%	36 Lap	2.359.443.200	2.424.466.000
	Capaian/Realisasi		100%	36 Lap	2.116.635.530	2.183.555.002
	%		100%	100%	89,71%	90,06%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Target/Anggaran		12 Lap	12 Lap	32.000.000	27.120.000
	Capaian/Realisasi		12 Lap	12 Lap	24.060.030	24.341.560
	%		100%	100%	75,19%	89,76%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan				
	Target/Anggaran		12 lap	12 lap	1.199.000.000	1.269.000.000
	Capaian/Realisasi		12 lap	12 lap	1.048.235.776	1.127.137.221
	%		100%	100%	87,43%	88,82%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
	Target/Anggaran		12 lap	12 lap	1.128.443.200	1.128.346.000
	Capaian/Realisasi		12 lap	12 lap	1.044.339.724	1.032.076.221

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	%		100%	100%	92,55%	91,47%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output: Barang milik daerah dalam kondisi baik				
		Outcome: Kelancaran operasional kantor				
	Target/Anggaran		28 jenis	377 unit	6.314.120.400	6.005.065.000
	Capaian/Realisasi		28 jenis	377 unit	5.703.285.770	5.304.314.747
	%		100%	100%	90,33%	88,33%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				
	Target/Anggaran		4 Unit	4 Unit	43.000.000	45.000.000
	Capaian/Realisasi		4 Unit	4 Unit	34.933.000	4.480.000
	%		100%	100%	81,24%	9,96%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
	Target/Anggaran		155 Unit	155 Unit	801.340.000	850.115.000
	Capaian/Realisasi		155 Unit	155 Unit	735.066.950	696.480.261
	%		100%	100%	91,73%	81,93%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
	Target/Anggaran		200 unit	200 unit	575.000.000	575.000.000
	Capaian/Realisasi		240 unit	200 unit	514.099.500	556.910.578
	%		100%	100%	89,41%	96,85%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				
	Target/Anggaran		18 unit	18 unit	4.894.780.400	4.534.950.000
	Capaian/Realisasi		18 unit	18 unit	4.419.186.320	4.046.443.908
	%		100%	100%	90,28%	89,23%
	<b>Kegiatan :</b>					

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Output: Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah				
		Outcome: Kelancaran operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah				
	Target/Anggaran		100%	100%	1.823.725.600	130.000.000
	Capaian/Realisasi		100%	100%	1.434.040.931	130.000.000
	%		100%	100%	78,63%	100%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	Target/Anggaran		2 org/bln	2 org/bln	184.525.600	570.446.166
	Capaian/Realisasi		2 org/bln	2 org/bln	171.284.390	545.297.942
	%		100%	100%	92,82%	95,59%
	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				
	Target/Anggaran		1 paket	1 paket	130.000.000	130.000.000
	Capaian/Realisasi		1 paket	1 paket	129.000.000	130.000.000
	%		100%	100%	99,23%	100%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah				
	Target/Anggaran		5 Orang	5 Orang	59.200.000	62.500.000
	Capaian/Realisasi		5 Orang	5 Orang	43.356.577	53.178.700
	%		100%	100%	73,24%	85,09%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah				
	Target/Anggaran		17 org/bln	17 org/bln	1.450.000.000	600.000.000
	Capaian/Realisasi		17 org/bln	17 org/bln	1.090.399.964	564.000.000
	%		100%	100%	75,20%	94%
	<b>Kegiatan :</b>					



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Output: Kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah				
		Outcome: Kelancaran kerumahtanggaan sekretariat daerah				
	Target/Anggaran		11 paket	12 paket	1.826.444.200	1.687.321.200
	Capaian/Realisasi		11 paket	12 paket	1.627.160.795	1.457.531.500
	%		100%	100%	89,09%	86,38%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				
	Target/Anggaran		5 Paket	5 Paket	960.750.600	994.125.600
	Capaian/Realisasi		5 Paket	5 Paket	915.739.730	933.882.300
	%		100%	100%	95,32%	93,94%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				
	Target/Anggaran		5 Paket	5 Paket	566.159.000	593.661.000
	Capaian/Realisasi		5 Paket	5 Paket	468.286.465	424.114.600
	%		100%	100%	82,71%	71,44%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				
	Target/Anggaran		1 Paket	1 Paket	299.534.600	99.534.600
	Capaian/Realisasi		1 Paket	1 Paket	243.134.600	99.534.600
	%		100%	100%	81,17%	100%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Penataan Organisasi	Output: Dokumen penataan organisasi Outcome: Meningkatnya kinerja organisasi				
	Target/Anggaran		7 Dok	7 Dok	357.912.500	317.637.000
	Capaian/Realisasi		7 Dok	7 Dok	258.018.855	263.376.068
	%		100%	100%	72,09%	82,92%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
	Target/Anggaran		2 Dok	2 Dok	172.035.000	107.035.000
	Capaian/Realisasi		2 Dok	2 Dok	113.206.355	94.321.568

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	%		100%	100%	65,80%	88,12%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
	Target/Anggaran		2 Lap	2 Lap	55.680.000	80.680.000
	Capaian/Realisasi		2 Lap	2 Lap	33.508.000	51.230.750
	%		100%	100%	60,18%	63,50%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	41.430.000	41.430.000
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	34.191.500	34.435.750
	%		100%	100%	82,53%	83,12%
	Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	46.680.000	46.405.000
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	39.438.000	43.452.000
	%		100%	100%	84,49%	93,64%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	42.087.500	42.087.500
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	37.675.000	39.936.000
	%		100%	100%	89,52%	94,89%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Output: Laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan				
		Outcome: Kelancaran pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan				
	Target/Anggaran		9 Lap	17 Lap	3.342.150.350	4.144.212.575
	Capaian/Realisasi		9 Lap	17 Lap	2.829.833.714	3.731.007.911
	%		100%	100%	84,67%	90,03%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				
	Target/Anggaran		1 Lap	1 Lap	803.787.500	857.452.800
						821.283.640

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Capaian/Realisasi		1 Lap	1 Lap	702.156.752	
	%		100%	100%	87,36%	95,78%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				
	Target/Anggaran		4 Lap	4 Lap	1.347.448.000	2.196.683.175
	Capaian/Realisasi		4 Lap	4 Lap	1.081.367.733	1.840.784.272
	%		100%	100%	80,25%	83,80%
	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
	Target/Anggaran		4 Lap	4 Lap	1.190.914.850	1.090.076.600
	Capaian/Realisasi		4 Lap	4 Lap	1.046.309.229	1.068.939.999
	%		100%	100%	87,86%	98,06%
	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	Penyelenggaraan Pemerintah Transparan dan Akuntabel				
	Target/Anggaran		100%		16.050.904.451	
	Capaian/Realisasi		96,67%		15.687.745.984	
	%		96,67%		97,74%	
	<b>Kegiatan :</b>					
	Administrasi Tata Pemerintahan	Output: Dokumen administrasi tata pemerintahan				
		Outcome: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
	Target/Anggaran		10 Dok	8 Dok	852.242.601	980.186.741
	Capaian/Realisasi		9 Dok	8 Dok	771.576.618	933.702.134
	%		90%	100%	90,53%	95,26%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan				
	Target/Anggaran		2 Dok	2 Dok	546.332.200	596.814.450
	Capaian/Realisasi		2 Dok	2 Dok	506.883.745	581.084.029
	%		100%	100%	92,78%	97,36%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	59.988.050	109.101.000
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	52.842.796	88.714.776
	%		100%	100%	88,09%	81,31%

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
	Target/Anggaran		7 Dok	5 Dok	245.922.351	274.271.291
	Capaian/Realisasi		6 Dok	5 Dok	211.850.077	263.903.329
	%		85,71%	100%	86,15%	96,22%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Output: Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat Outcome: Terkendalinya kebijakan kesejahteraan rakyat				
	Target/Anggaran		9 Dok	9 Dok	14.751.643.650	14.590.990.800
	Capaian/Realisasi		9 Dok	9 Dok	14.596.812.346	14.204.288.349
	%		100%	100%	98,95%	97,35%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
	Target/Anggaran		4 Dok	4 Dok	6.976.732.900	6.976.768.500
	Capaian/Realisasi		4 Dok	4 Dok	6.863.846.439	6.699.128.060
	%		100%	100%	98,38%	96,02%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				
	Target/Anggaran		4 Dok	4 Dok	5.320.660.450	5.320.234.450
	Capaian/Realisasi		4 Dok	4 Dok	5.288.604.977	5.288.035.986
	%		100%	100%	99,40%	99,39%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				
	Anggaran		1 Dok	1 Dok	2.454.250.300	2.293.987.850
	Realisasi		1 Dok	1 Dok	2.444.360.930	2.217.124.303
	%		100%	100%	99,60%	96,65%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Fasilitasi Dan koordinasi Hukum	Output: Produk hukum daerah yang terharmonisasi				
		Outcome: Produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan				
	Target/Anggaran		100%	509 Dok	447.018.200	426.645.730
	Capaian/Realisasi		100%	509 Dok	319.357.020	244.827.695
	%		100%	100%	71,44%	57,38%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				
	Target/Anggaran		500 Dok	500 Dok	86.149.500	84.676.600
	Capaian/Realisasi		700 Dok	710 Dok	86.038.410	84.564.350
	%		100%	100%	99,87%	99,87%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				
	Target/Anggaran		4 Kasus	5 Kasus	214.017.500	212.429.680
	Capaian/Realisasi		4 Kasus	1 Kasus	99.262.640	41.420.905
	%		100%	20%	46,38%	19,50%
	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				
	Target/Anggaran		5 Dok	5 Dok	146.851.200	129.539.450
	Capaian/Realisasi		5 Dok	5 Dok	134.055.970	118.842.440
	%		100%	100%	91,29%	91,74%
	<b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung				
	Target/Anggaran		100%	100%	3.284.475.670	243.190.304
	Capaian/Realisasi		100%	100%	2.945.109.901	174.111.518
	%		100%	100%	89,67%	71,59%
	<b>Kegiatan :</b>					

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Output: Laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian				
		Outcome: Terkendalinya kebijakan perekonomian				
	Target/Anggaran		11 Dok	11 Dok	111.264.270	134.081.284
	Capaian/Realisasi		11 Dok	11 Dok	101.009.073	85.387.003
	%		100%	100%	90,78%	63,68%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				
	Target/Anggaran		4 Dok	4 Dok	31.219.060	72.258.900
	Capaian/Realisasi		4 Dok	4 Dok	28.018.150	31.819.963
	%		100%	100%	89,75%	44,04%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan dan Distribusi Perekonomian				
	Target/Anggaran		14 Dok	7 Dok	80.045.210	61.822.384
	Capaian/Realisasi		14 Dok	7 Dok	72.990.923	53.567.040
	%		100%	100%	91,19%	86,65%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Output: Dokumen administrasi pembangunan				
		Outcome: Terkendalinya administrasi pembangunan				
	Target/Anggaran		13 Dok	13 Dok	812.641.390	668.230.775
	Capaian/Realisasi		13 Dok	13 Dok	777.998.753	585.763.762
	%		100%	100%	95,74%	87,66%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				
	Target/Anggaran		1 Lap	1 Lap	599.631.250	595.705.000
	Capaian/Realisasi		1 Lap	1 Lap	565.942.800	515.926.806
	%		100%	100%	94,38%	86,61%
	Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Target/Anggaran		12 Lap	12 Lap	213.010.140	72.525.775
	Capaian/Realisasi		12 Lap	12 Lap	212.055.953	69.836.956
	%		100%	100%	99,55%	96,29%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Output: Dokumen pengelolaan barang dan jasa				
		Outcome: Terkelolanya barang dan jasa sesuai aturan				
	Target/Anggaran		5 Dok	3 Dok	2.243.566.450	2.336.994.264
	Capaian/Realisasi		5 Dok	3 Dok	1.963.731.060	1.994.878.968
	%		100%	100%	87,53%	85,36%
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	361.538.150	332.277.325
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	344.265.558	294.884.225
	%		100%	100%	95,22%	88,75%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
	Target/Anggaran		4 Dok	1 Dok	383.687.000	413.683.139
	Capaian/Realisasi		4 Dok	1 Dok	354.042.286	399.123.514
	%		100%	100%	92,27%	96,48%
	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan barang Dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
	Target/Anggaran		450 orang	350 orang	1.498.341.300	1.591.033.800
	Capaian/Realisasi		457 orang	416 Orang	1.265.423.216	1.300.871.229
	%		100%	100%	84,45%	81,76%
	<b>Kegiatan :</b>					
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Output: Dokumen hasil kebijakan sumber daya alam				
		Outcome: Data dan informasi kebijakan sumber daya alam yang relevan				
	Target/Anggaran		2 Dok	2 Dok	117.003.560	109.109.020
	Capaian/Realisasi		2 Dok	2 Dok	102.371.015	88.724.515
	%		100%	100%	87,49%	81,32%



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Anggaran dan Realisasi per Tahun (Rupiah)	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	49.841.320	55.946.750
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	42.573.800	45.201.655
	%		100%	100%	85,42%	80,79%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	67.162.240	53.162.270
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	59.797.215	43.522.860
	%		100%	100%	89,03%	81,87%
	<b>Jumlah Anggaran</b>					
	<b>Anggaran</b>				<b>64.232.207.634</b>	<b>67.541.970.350</b>
	<b>Realisasi</b>				<b>60.237.102.593</b>	<b>59.214.330.513</b>
	<b>%</b>				<b>93,78</b>	<b>87,87</b>

Pada tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan 3 (tiga) Program yang terjabarkan dalam 18 (delapan belas) kegiatan dan 61 (enampuluh satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja kegiatan dengan indikator dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan dengan target 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen atau terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 86,12% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.277.645,- terealisasi sebesar Rp. 72.578.370,-.

Faktor pendorong:

1. Adanya dukungan pimpinan dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
2. Tersedianya aplikasi *e monev pro*
3. Koordinasi yang baik antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

Faktor Penghambat:

1. Pada proses perencanaan masih disusun secara manual sehingga menimbulkan inkonsistensi data
2. Masih adanya data yang belum terpenuhi dalam penyusunan perencanaan
3. Masih kurangnya jumlah serta kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan

**(1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja output sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 67.98% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.471.280,- terealisasi sebesar Rp.23.433.220,-.

Faktor pendorong:

1. Adanya dukungan pimpinan baik dalam proses perencanaan
2. Adanya koordinasi dan Kerjasama antar bagian dalam penyusunan perencanaan

Faktor Penghambat:

1. Keterlambatan data dari bagian sebagai penyusunan laporan
2. Sumber Daya Manusia yang membidangi perencanaan masih kurang

**(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Capaian kinerja output sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target indikator Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 99.59% dengan pagu Rp. 9.134.575,- terealisasi Rp. 9.097.200,-.

Faktor Pendorong;

1. Adanya Renstra dan juga renja sebagai pedoman dalam penyusunan RKA
2. Adanya kerjasama yang baik dengan bagian dalam penyusunan RKA

Faktor Penghambat:

1. Keterlambatan data dari bagian dilingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan RKA
2. Masih sering terjadi kendala teknis pada penggunaan aplikasi SIPD

**(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

Capaian kinerja output sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 99.33% dengan pagu Rp. 7.619.225,- terealisasi Rp. 7.568.400,-.

Faktor Pendorong:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan bagian di lingkungan sekretariat daerah dalam penyusunan RKA
2. Tersedianya renstra dan renja perubahan perangkat daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA

Faktor Penghambat:

1. Keterlambatan data dari bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD
2. Masih sering terjadi kendala teknis pada penggunaan aplikasi SIPD

**(4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**

Capaian kinerja output sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 99.39% dengan pagu Rp.9.166.300,- terealisasi Rp. 9.110.550,-

Faktor Pendorong:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan bagian di lingkungan sekretariat daerah dalam penyusunan DPA
2. Tersedianya renstra dan renja perubahan perangkat daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan DPA

Faktor Penghambat:

Keterlambatan data dari bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan DPA

**(5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**

Capaian kinerja output sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan target indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 99.24% dengan pagu anggaran Rp. 7.819.025,- terealisasi sebesar Rp. 7.759.400,-

Faktor Pendorong:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan bagian di lingkungan sekretariat daerah dalam penyusunan DPA
2. Tersedianya renstra dan renja perubahan perangkat daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan DPA

Faktor Penghambat:

Keterlambatan data dari bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan perubahan DPA

#### **(6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Capaian kinerja output sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target indikator jumlah laporan valuasi kinerja Perangkat Daerah sebanyak 3 laporan dan terealisasi 3 laporan atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 97.15% dengan alokasi sebesar Rp.16.067.240,- terealisasi sebesar Rp. 15.609.600,-.

Faktor Pendorong:

1. Adanya dokumen perencanaan dan petunjuk teknis penyusunan pelaporan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja
2. Adanya koordinasi dan kerjasama antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam penyediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja

Faktor Penghambat:

Keterlambatan data dari bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai bahan dan informasi dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi serta laporan kinerja Perangkat Daerah

#### **b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator dokumen keuangan Perangkat Daerah dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 85.33% dengan pagu anggaran Rp.21.320.726.488,- terealisasi sebesar Rp.18.192.430.216,-.

Faktor pendorong:

Tersedianya aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan secara integrasi

Faktor Penghambat:

Tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

**(1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN**

Capaian kinerja output sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 110 orang/bulan dan terealisasi 100%. Sedangkan capaian anggaran 85.25% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.154.850.527,- terealisasi sebesar Rp. 18.035.126.111,-.

Faktor Pendorong:

Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan kebutuhan pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah

Faktor Penghambat:

Tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

**(2) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Capaian kinerja output sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target indikator jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar 94.83% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 165.875.961,- terealisasi sebesar Rp. 157.304.105,-.

Faktor pendorong:

Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar bendahara di setiap bagian dengan bidang keuangan sehingga penyusunan laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu

Faktor penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan merupakan kegiatan rutin pada tiap tahunnya

**c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Capaian kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar 100% yang terealisasi 82%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 51.25% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 313.000.000,- terealisasi sebesar 160.420.973,-

Faktor pendorong:

1. Adanya dukungan pimpinan kepada pegawai untuk mengikuti diklat sehingga dapat meningkatkan kompetensi
2. Tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan diklat/bimtek pegawai dan penyediaan pakaian dinas pegawai

Faktor penghambat:

Rendahnya capaian realisasi keuangan dikarenakan terdapat belanja kontribusi diklat yang belum terserap sementara anggaran SPPD sudah terealisasi maksimal.

**(1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Capaian kinerja output sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan indikator jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan sebanyak 1 paket dan terealisasi 1 paket atau 100%. Sedangkan realisasi capaian anggaran sebesar 90.83% dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.500.000,-

Faktor pendorong:

1. Tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
2. Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan tepat waktu

Faktor penghambat:

Sulitnya mencari penyedia yang kompeten

**(2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Capaian kinerja sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan target 25 orang yang terealisasi sebanyak 16 orang atau 64%. sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 41.87% dengan pagu Rp. 253.000.000,- terealisasi Rp. 105.920.973,-

Faktor Pendorong:

Tersedianya anggaran yang memadai bagi pegawai untuk melaksanakan diklat sesuai tugas pokok dan fungsi

Faktor Penghambat

1. Adanya penundaan kegiatan yang telah dijadwalkan
2. Terdapat belanja kontribusi diklat yang belum terserap sementara anggaran SPPD sudah terealisasi maksimal, sehingga tertundanya pelaksanaan diklat yang telah diusulkan oleh pegawai

**d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Capaian kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah sebesar target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 69.27% dengan pagu anggaran Rp. 5.009.900.862,- terealisasi sebesar Rp. 3.470.540.258,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang kinerja pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal

Faktor penghambat:

Tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan bersifat rutin/dilaksanakan pada tiap tahun

**(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket dan terealisasi 1 paket atau 100%. Sedangkan capaian anggaran sebesar 99.49% dengan pagu sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 198.977.500,-

Faktor pendorong:

1. Tersedianya perwakilan dari penyedia di Kabupaten Belitung sehingga memudahkan dalam proses koordinasi
2. Proses pengiriman barang yang cukup cepat sehingga mempunyai cukup waktu dalam proses pembayaran

Faktor penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan bersifat rutin/dilaksanakan pada tiap tahun

**(2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Capaian sub kegiatan dengan target indikator jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 2 paket tercapai 2 paket atau 100%. Sedangkan capaian anggaran sebesar 93.85% dengan pagu anggaran Rp. 260.281.962,- terealisasi sebesar Rp. Rp. 244.281.000,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran dan adanya kerjasama yang baik dengan penyedia barang dan jasa sehingga kegiatan berjalan lancar

Faktor penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan bersifat rutin/dilaksanakan pada tiap tahun

**(3) Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan sebanyak 1 paket tercapai 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 99.42% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 198.835.000,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran dan adanya kerjasama yang baik dengan penyedia barang dan jasa sehingga kegiatan berjalan lancar

Faktor penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan bersifat rutin/dilaksanakan pada

**(4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 2 Paket atau terealisasi 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 75.62% dengan pagu anggaran Rp. 1.656.773.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.252.777.417,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran dan adanya kerjasama yang baik dengan penyedia barang dan jasa sehingga kegiatan berjalan lancar

Faktor penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan bersifat rutin/dilaksanakan pada tiap tahun dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan

**(5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak sebanyak 1 Paket terealisasi 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 76.72% dengan pagu anggaran Rp. 48.421.900,- terealisasi Rp. 37.147.400,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran dan adanya kerjasama yang baik dengan penyedia barang dan jasa sehingga kegiatan berjalan lancar

Faktor penghambat:

Sulitnya memprediksi kebutuhan dikarenakan berdasarkan permintaan dari bagian-bagian

**(6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan target indikator jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 Dokumen atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 99.89% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- terealisasi sebesar Rp.124.865.000,-

Faktor pendorong:

Adanya koordinasi aktif dengan pihak media dalam rangka penyediaan bahan bacaan meliputi surat kabar, majalah dan bulletin selama 1 tahun di lingkungan Sekretariat Daerah

Faktor penghambat:

1. Terlambatnya distribusi
2. Terhentinya proses produksi
3. Kenaikan harga langganan



**(7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan target indikator yaitu jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan tercapai 12 laporan atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 58.18 % dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.644.424.000,- terealisasi sebesar Rp.1.538.521.941,-.

Faktor pendorong:

Ketersediaan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Faktor penghambat:

Pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai dengan perencanaan dan kegiatan ini terlaksana berdasarkan undangan.

**(8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan target indikator jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.17.400.000,-.

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat:

Lambatnya *bandwith trafik domain name server* (DSN), terblokirnya IP, terhack

**e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Capaian kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target indikator jenis barang milik daerah sebanyak 98 Unit terealisasi sebanyak 98 unit atau 100%. Capaian kinerja anggaran tercapai sebesar 87.65% dengan pagu sebesar Rp. 5.483.778.800,- teralisasi sebesar Rp. 4.806.261.400,-

Faktor pendorong

1. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa tepat waktu
2. Tersedianya anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasan
3. Pengadaan dilakukan melalui sistem *e-katalog*

Faktor penghambat

1. Terdapat perbedaan harga satuan pada tahap perencanaan dengan tahap pelaksanaan kegiatan
2. Terbatasnya SDM pejabat pembuat komitmen sehingga pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilaksanakan lebih awal.

**(1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Capaian kinerja output sub kegiatan pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 9 unit terealisasi sebanyak 8 unit atau 88,88%. Sedangkan realisasi capaian anggaran sebesar 87.65% dengan pagu anggaran Rp. 2.950.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.584.000.000,-

Faktor pendorong:

1. Pengadaan dilakukan secara Elektronik melalui sitem *e-katalog* LKPP sehingga memudahkan proses pengadaan
2. Tersedianya perwakilan dari penyedia di Kabupaten Belitung sehingga memudahkan dalam proses koordinasi
3. Proses pengiriman barang yang cukup cepat sehingga mempunyai cukup waktu dalam proses pembayaran

Faktor penghambat:

Ketersediaan kendaraan dinas pada penyedia yang belum sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen anggaran sehingga belum dapat mengakomodir seluruh pengadaan kendaraan dinas.

**(2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan target indikator jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 90 unit terealisasi 82 unit atau 91,11%. Capaian realisasi anggaran sebesar 79.24% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 196.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 155.700.000,-

Faktor pendorong

Pengadaan dilakukan secara elektronik melalui *e-katalog* LKPP sehingga memudahkan proses pengadaan

Faktor penghambat

1. Tidak tersedianya barang pada *e-katalog* lokal Kabupaten Belitung sehingga harus mencari penyedia di *e-katalog* nasional.
2. Terdapat 1 item pengadaan yang tidak direalisasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

**(3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan target indikator jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 127 unit terealisasi sebanyak 127 unit atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 89.33% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.939.278.800,- terealisasi sebesar Rp. 1.732.296.000,-

Faktor pendorong

1. Pengadaan dilakukan secara Elektronik melalui *e-katalog* LKPP sehingga memudahkan proses pengadaan

2. Sebagian besar barang tersedia dalam *e-katalog* lokal sehingga memudahkan proses pengiriman

Faktor penghambat

1. Terdapat pengadaan peralatan yang proses pengadaannya harus menunggu arahan dari LKPP terkait dengan kebijakan konsolidasi pengadaan nasional oleh LKPP
2. Terbatasnya SDM pejabat pembuat komitmen sehingga pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilaksanakan lebih awal.

**(4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan target indikator jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan sebanyak 2 unit teralisasi 2 unit atau 100%. Sedangkan capaian anggaran sebesar 83.99% dengan pagu anggaran Rp. 398.000.000,- terealisasi Rp. 334.265.400,-

Faktor pendorong

Lokasi penyedia barang berada dalam satu kota dengan mess sehingga cukup memudahkan proses pengiriman barang

Faktor penghambat

1. Terbatasnya penyedia yang bersedia untuk pengadaan di luar daerah
2. Terbatasnya SDM pejabat pembuat komitmen sehingga pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilaksanakan lebih awal

**f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Capaian kinerja kegiatan dengan indikator pemenuhan kebutuhan layanan administrasi sebesar 100% tercapai 100%. Capaian realisasi keuangan sebesar 90.06% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.424.466.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.183.555.002,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang kinerja pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal

Faktor penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan bersifat rutin/dilaksanakan pada tiap tahun

**(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan target indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan tercapai 100%. Sedangkan capaian kinerja realisasi anggaran sebesar 89.76% dengan pagu anggaran Rp. 27.120.000,- terealisasi Rp. 24.341.560,-

Faktor Pendorong:

Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat:

Tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

**(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi 100%. Capaian kinerja anggaran sebesar 88.82% dengan pagu anggaran Rp.1.269.000.000,- terealisasi Rp. 1.127.137.220,-

Faktor Pendorong:

Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat:

Tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan bersifat rutin

**(3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan dengan realisasi 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 91.47% dengan pagu anggaran 1.128.443.200,- terealisasi Rp. 1.032.076.221,-

Faktor Pendorong:

Tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan bersifat rutin/dilaksanakan pada tiap tahun

**g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Capaian kinerja kegiatan dengan indikator barang milik daerah dalam kondisi baik dengan target sebanyak 28 jenis terealisasi sebanyak 28 jenis atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 88.33% dengan pagu Rp. 6.005.065.000,- terealisasi Rp. 5.304.314.747

Faktor pendorong:

1. Tersedianya anggaran yang mencukupi dalam pelaksanaan pemeliharaan terhadap barang milik daerah (bangunan/gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor serta kendaraan dinas dan operasional).
2. Tersedianya perwakilan penyedia di Kabupaten Belitung sehingga memudahkan dalam proses koordinasi

Faktor penghambat:

Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi bidang konstruksi di bagian umum

**(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan target indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 9.96% dengan pagu anggaran Rp. 45.000.000,- terealisasi 4.480.000,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat:

Karena kendaraan dinas jabatan yang dipakai adalah jenis baru yang hanya memerlukan service atau pemeliharaan ringan, tidak ada pemeliharaan berat atau penggantian sparepart

**(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan target jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 155 unit terealisasi 15 unit atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 81.93% dengan pagu anggaran Rp. 850.115.000,- terealisasi Rp. 696.480.261,-.

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat:

Karena kendaraan dinas lapangan yang dipakai adalah jenis baru yang hanya memerlukan servis atau pemeliharaan ringan saja, tidak ada pemeliharaan berat.

**(3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan target indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 200 unit terealisasi 200 unit atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 96.85% dengan pagu anggaran Rp. 575.000.000,- terealisasi Rp. 556.910.578,-

Faktor pendorong:

Tersedianya perwakilan penyedia di Kabupaten Belitung sehingga memudahkan dalam proses koordinasi

Faktor penghambat:

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan karena bersifat rutin

**(4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 18 unit dari target yang ditetapkan sebanyak 18 unit atau 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 89.23% dengan pagu anggaran Rp. 4.534.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.046.443.908,-

Faktor pendorong:

1. Tersedianya perwakilan dari penyedia di Kabupaten Belitung sehingga memudahkan dalam proses koordinasi
2. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa tepat waktu
3. Tersedianya anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasan

Faktor Penghambat:

Belum tersedianya SDM bidang konstruksi di bagian umum sebagai bagian penanggungjawab kegiatan

**h. Kegiatan Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**

Capaian kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan indikator administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000,- terealisasi Rp. 130.000.000,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah

Faktor penghambat:

Sulitnya dalam menentukan pihak ketiga yang sesuai dengan spesifikasi dan dalam menentukan paket medical check up untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah

**(1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 2 orang/bulan dan terealisasi 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 95.59% dengan pagu anggaran Rp. 570.446.166,- terealisasi Rp. 545.297.942,-

Faktor Pendorong:

Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Faktor Penghambat:

Tidak ada penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**(2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan sebanyak 1 paket terealisasi 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000,- terealisasi Rp. 130.000.000,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat:

Sulitnya mencari pihak ketiga yang sesuai dengan spesifikasi

**(3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 5 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 5 orang atau terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 85.09% dengan pagu anggaran Rp. 62.500.000,- terealisasi Rp. 53.178.700,-

Faktor pendorong:

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Faktor penghambat:

Sulitnya menentukan paket medical check up yang diinginkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**(4) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional dan perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah target yang ditetapkan sebanyak 17 orang/bulan dan teralisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 94% dengan pagu Rp.600.000.000,- terealisasi Rp. 564.000.000,-

Faktor pendorong:

Ketersediaan dana untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah

Faktor penghambat:

Tidak ada penghambat dalam melaksanakan kegiatan ini

**i. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah**

Capaian indikator kegiatan fasilitasi kerumahtangaan sekretariat daerah dengan indikator kebutuhan kerumahtanga sekretariat daerah sebanyak 11 paket dari target yang ditetapkan sebanyak 11 paket atau terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 86.38% dengan pagu anggaran Rp. 1.687.321.200,- terealisasi Rp. 1.457.531.500,-.

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerumahtangaan sekretariat daerah

Faktor Penghambat:

Tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

**(1) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan sebanyak 5 paket dari target yang telah ditetapkan sebanyak 5 paket atau terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 93.94% dengan pagu Rp. 994.125.600,- terealisasi Rp. 933.882.300,-

Faktor Pendorong:

Tersedianya anggaran penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah

Faktor Penghambat:

Belum lengkapnya barang-barang kebutuhan rumah tangga pada *e-katalog* Lokal sehingga pengadaan masih dilakukan secara manual

**(2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan target yang telah ditetapkan sebanyak 5 paket terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 82.71% dengan pagu Rp. 593.661.000,- terealisasi Rp. 424.114.600,-

Faktor Pendorong:

Tersedianya anggaran penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah

Faktor Penghambat:

Belum lengkapnya barang-barang kebutuhan rumah tangga pada *e-katalog* Lokal sehingga pengadaan masih dilakukan secara manual



**(3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah target yang telah ditetapkan sebanyak 1 paket terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 100% dengan pagu Rp.99.534.600,- terealisasi Rp. 99.534.600,-

Faktor Pendorong:

Tersedianya anggaran penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah

Faktor Penghambat:

Tidak ada penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan kebutuhan Sekretariat Daerah

**j. Kegiatan Penataan Organisasi**

Capaian kinerja kegiatan penataan organisasi dengan indikator dokumen penataan organisasi sebanyak 7 dokumen terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 82.92% dengan pagu anggaran Rp. 317.637.000,- terealisasi Rp. 263.376.068,-

Faktor Pendorong:

1. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dalam penyusunan dokumen penataan organisasi
2. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
3. Adanya sosialisasi, asistensi terkait pelaporan kinerja
4. Adanya kebijakan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan kinerja

Faktor Penghambat:

1. Kompetensi aparatur yang belum optimal
2. Belum optimalnya kualitas pelaporan informasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah

**(1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan target telah ditetapkan sebanyak 2 dokumen terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 88,12% dengan pagu anggaran Rp. 107.035.000,- terealisasi Rp. 94.321.568,-

Faktor Pendorong:

Tersedia anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat:

Tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

**(2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana target yang ditetapkan sebanyak 2 laporan terealisasi 2 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 63.50% dengan pagu anggaran Rp. 80.680.000,- terealisasi Rp. 51.230.750,-

Faktor pendorong:

1. Adanya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023
2. Adanya koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Adanya koordinasi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait kinerja penyelenggara pelayanan publik
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi bimbingan teknis mengenai tata cara pelayanan publik

### **(3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**

Capaian kinerja output sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi target telah ditetapkan sebanyak 1 Dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 83.12% dengan pagu anggaran Rp. 41.430.000,- terealisasi Rp. 34.435.750,-

Faktor pendorong :

1. Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024
2. Ditetapkannya keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor 188.45/001/VIII/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023

Faktor Penghambat:

Kurangnya kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan menjadi penghambat dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi, karena reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab bersama segenap elemen pemerintahan.

### **(4) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana sebanyak 1 dokumen dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1 dokumen atau tercapai 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 93.64% dengan pagu Rp. 46.405.000,- terealisasi sebesar Rp. 43.452.000,-

Faktor pendorong:

1. Adanya monitong dan evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ke OPD/UPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
2. Adanya Asistensi penyusunan IKM Kabupaten Belitung Tahun 2023
3. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan survvei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Faktor Penghambat:

1. Belum tersedianya petugas khusus yang melayani pengisian kuesioner
2. Penginputan data secara online melalui halaman web belum terlaksana dengan optimal oleh responden
3. Keterbatasan/kurangnya peralatan elektronik dan jaringan internet bagi responden pada waktu pengisian kuesioner

#### **(5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah target yang telah ditetapkan sebanyak 1 Dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 94.89% dengan pagu Rp. 42.087.500,- terealisasi sebesar Rp. 39.936.000,-

Faktor pendorong:

1. Adanya bimbingan teknis mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
2. Pelaksanaan Sosialisasi SAKIP Bersama BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Adanya Asistensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2023 bersama OPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

Faktor Penghambat:

1. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal
2. Kompetensi aparatur yang masih kurang karena belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur

#### **k. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan indikator laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi target yang ditetapkan 9 laporan terealisasi 9 laporan atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 90.03% dengan pagu anggaran Rp. 4.144.212.575,- terealisasi Rp. 3.731.007.911,-

Faktor pendorong:

1. Adanya koordinasi dan konsultasi antara Organisasi Perangkat Daerah
2. Ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya

##### **(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan target yang ditetapkan sebanyak 1 laporan terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 95.78% dengan pagu anggaran Rp. 857.452.800,- terealisasi Rp. 821.283.640,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat:

Terbatasnya kendaraan yang sesuai dengan peruntukan tamu yang datang

##### **(2) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan target yang ditetapkan sebanyak 4 laporan terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 83.80% dengan pagu anggaran Rp. 1.347.448.000,- terealisasi Rp. 1.081.367.733,-

Faktor pendorong:

Adanya koordinasi dan konsultasi antar SKPD yang berjalan dengan baik dan intens

Faktor Penghambat

1. Akuntabilitas dan resposibilitas OPD lambat dalam pelayanan publik (*Public service*)
2. Sulitnya menentukan tempat yang tepat dalam promosi pembangunan daerah

##### **(3) Sub Kegiatan Pendokumentasi Tugas Pimpinan**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan sebanyak target yang ditetapkan sebanyak 4 laporan dan tercapai 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 98.06% dengan pagu anggaran Rp. 1.090.076.600,- terealisasi Rp. 1.068.939.999,-

Faktor pendorong:

Tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat:

1. Tidak optimal dukungan peralatan
2. kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya

## **2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

### **a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**

Capaian kinerja kegiatan administrasi tata pemerintahan dengan indikator Dokumen administrasi tata pemerintahan target yang telah ditetapkan sebanyak 8 dokumen dan terealisasi sebesar 100%. capaian realisasi anggaran sebesar 95.26 % dengan pagu anggaran Rp. 980.186.741,- terealisasi Rp. 933.702.134,-

Faktor pendorong:

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan
2. Terbentuknya tim penyusun laporan dan tim koordinasi kerjasama daerah
3. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah berjalan dengan baik

Faktor penghambat:

1. Minimnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan
2. Minimnya sarana dan prasarana yang memadai

#### **(1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemeritahan**

Capaian kinerja sub kegitan dengan indikator jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan ditetapkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 97.36% dengan pagu Rp. 596.814.450,- terealisasi sebesar Rp. 581.084.029,-

Faktor pendorong:

1. Tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan
2. Adanya surat permintaan/pemberitahuan terkait dana hibah

Faktor penghambat:

1. Menyelaraskan jadwal pimpinan dalam menyelenggarakan rakor forkopimda
2. Belum terbentuknya tim koordinasi OPD yang berkoordinasi melalui bagian pemerintahan
3. Minimnya sarana dan prasarana yang memadai

#### **(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**

Capaian kinerja sub kegitan dengan indikator jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan ditetapkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 81,31% dengan pagu Rp. 109.101.000,- terealisasi sebesar Rp. 88.714.776,-

Faktor pendorong:

Tersedianya Anggaran pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat:

1. Minimnya sumber daya manusia (SDM)
2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung lapangan dan kantor

**(3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan ditetapkan sebanyak 5 dokumen dan terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 96.22% dengan pagu Rp. 274.271.291,- terealisasi sebesar Rp. 263.903.329,-

Faktor pendorong:

1. Adanya Tim penyusun LPPD Kabupaten Belitung
2. Adanya Tim koordinasi kerja sama Daerah Kabupaten Belitung
3. Adanya Tim Evaluasi penerapan standar pelayanan Minimal di Kabupaten Belitung
4. Adanya surat permintaan pembayaran iuran APKASI dan ASPEKSINDO

Faktor penghambat:

1. Data LPPD/SPM/RLPPD kurang valid sehingga banyak perbaikan dalam rancangan buku LPPD/SPM/RLPPD
2. Perumusan rancangan kerjasama oleh pemrakarsa belum terkoordinasi dengan baik
3. Surat permintaan pembayaran iuran Aspekindo baru diterima pada Triwulan IV sehingga pembayaran iuran dilakukan pada akhir tahun Anggaran 2023

**b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

Capaian kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dengan indikator dokumen kebijakan kesejahteraan target yang ditetapkan sebanyak 9 dokumen dan terealisasi 9 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 97.35% dengan pagu anggaran Rp. 14.590.990.800,- terealisasi Rp. 14.204.288.349,-

Faktor pendorong:

1. Adanya kebijakan/peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemberian dana hibah, tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan beasiswa masyarakat Belitung
2. Terbentuknya Tim Pembina UKS/M kabupaten Belitung,
3. Adanya Kerjasama dengan pihak ketiga

Faktor penghambat:

1. Masih terdapatnya Yayasan/Lembaga yang menerima dana hibah kabupaten Belitung tahun 2023 mengembalikan sisa anggaran yang tidak dapat pertanggungjawaban pada saat pelaporan akhir kegiatan.
2. Seleksi Beasiswa Penuh dilaksanakan dengan melibatkan pihak sekolah, pihak perguruan tinggi sehingga berjalan dalam waktu yang lama

3. Masih ada sekolah-sekolah yang belum memfungsikan Sekretariat UKS/M di sekolah Masing-masing dan belum melibatkan Peserta didik dalam Pelaksanaan kegiatan UKS/M di sekolah

**(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual target yang ditetapkan sebanyak 4 dokumen terealisasi 100%. Capaian realisasi keuangan sebesar 96,02% dengan pagu anggaran Rp. 6.976.768.500,- terealisasi Rp. 6.699.128.060,-

Faktor pendorong:

1. Adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Terkait Pemberian Dana Hibah (BERUAH) di Kabupaten Belitung Pada Tahun 2023.
2. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Terkait Pemberian Insentif Pemuka Agama di Kabupaten Belitung Tahun 2023
3. Telah dilakukan konsultasi dan konsolidasi terkait pemberian insentif pemuka agama.
4. Pelaksanaan ibadah haji Kabupaten Belitung Merupakan salah satu Tanggung Jawab Pemerintah kabupaten Belitung Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 pasal 9 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota ditingkat Kabupaten/Kota Merupakan Koordinator penyelenggaraan Ibadah Haji. Untuk menciptakan perjalanan ibadah haji Kabupaten Belitung dapat Merasakan Kenyamanan dan Ketenangan beribadah, Pemerintah Kabupaten Belitung memberikan dukungan melalui pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji.

Faktor penghambat:

Masih terdapatnya Yayasan/Lembaga yang menerima dana hibah kabupaten Belitung tahun 2023 mengembalikan sisa anggaran yang tidak dapat pertanggungjawaban pada saat pelaporan akhir kegiatan.

**(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB target yang ditetapkan sebanyak 4 dokumen atau terealisasi 4 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 99.39% dengan pagu anggaran Rp. 5.320.234.450,- terealisasi Rp. 5.288.035.986,-

Faktor pendorong:

1. Adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati terkait Pemberian Dana

- Hibah Yayasan/Lembaga Ormas di Kabupaten Belitung Pada Tahun 2023
2. Adanya Tim Pembina UKS/M kabupaten Belitung melakukan kegiatan lomba tingkat kabupaten terkait pelaksanaan kegiatan UKS/M di sekolah/sekolah yang ada di Kabupaten Belitung agar dapat dalam pengelolaan UKS/M di sekolah tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Faktor penghambat:

Masih ada sekolah-sekolah yang belum memfungsikan Sekretariat UKS/M di sekolah Masing-masing dan belum melibatkan Peserta didik dalam Pelaksanaan kegiatan UKS/M di sekolah

**(3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas sebanyak 1 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen atau terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 96.65% dengan pagu anggaran Rp. 2.293.987.850,- terealisasi Rp. 2.217.124.303,-

Faktor pendorong:

1. Tingginya minat masyarakat lulusan SLTA untuk mengikuti seleksi beasiswa penuh dan seleksi dilaksanakan langsung oleh perguruan tinggi
2. Penyeleksian setiap berkas mahasiswa yang mengajukan beasiswa parsial dilakukan dengan mekanisme oleh panitia penerima berkas beasiswa sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku

Faktor penghambat:

1. Karena adanya perubahan Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian bantuan biaya Pendidikan Beasiswa Masyarakat Belitung
2. Seleksi Beasiswa Penuh dilaksanakan dengan melibatkan pihak sekolah, pihak perguruan tinggi sehingga berjalan dalam waktu yang lama

**c. Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Hukum**

Capaian kinerja kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum dengan indikator Produk hukum daerah yang terharmonisasi target yang ditetapkan sebanyak sebesar 100% terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 57.38% dengan pagu anggaran Rp. 426.645.730,- terealisasi Rp. 244.827.695,-

Faktor pendorong:

1. Adanya kerjasama yang baik dengan Organisasi Bantuan Hukum
2. Adanya peraturan yang mengatur tata laksana penyusunan produk hukum daerah



Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya SDM khususnya tenaga perancang perundang-undangan
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

**(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah produk hukum daerah yang disusun target yang ditetapkan sebanyak 500 dokumen terealisasi 886 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 99.87% dengan pagu anggaran Rp. 84.676.600,- terealisasi Rp. 84.564.350,-

Faktor Pendorong:

Adanya Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/001/KEP/III/2023 Tentang Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Belitung pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya tenaga personil Sumber Daya Manusia pada Bagian Hukum khususnya Tenaga Perancang Perundang-undangan
2. Penyampaian rancangan produk hukum daerah dari OPD Pemrakarsa melebihi waktu tanggal penyampaian.

**(2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum target yang ditetapkan sebanyak 4 kasus dan terealisasi sebanyak 3 kasus atau 75%. Capaian realisasi anggaran sebesar 19,50% dengan pagu Rp. 212.429.680,- terealisasi Rp. 41.420.905,-

Faktor Pendorong:

Adanya kerjasama yang baik dengan Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dari Kemenkumham di Kabupaten Belitung, sehingga bisa saling bersinergi dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum.

Faktor Penghambat:

1. Kegiatan bersifat insidental, sehingga apabila tidak ada perkara atau kasus hukum yang ditangani maka anggaran kegiatan tidak terserap/tidak terealisasi;
2. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia kuasa hukum dalam rangka penanganan perkara baik itu bersifat perdata maupun tata usaha negara;
3. Masih kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

**(3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi target yang ditetapkan sebanyak 5 dokumen terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 91.74% dengan pagu anggaran Rp. 129.539.450,- terealisasi Rp. 118.842.440,-  
Faktor Pendorong:

Adanya Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/667/KEP/III/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/045A/KEP/III/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung.

Faktor Penghambat:

Kurangnya penyimpanan dokumen arsip produk hukum daerah.

**3. Program Perekonomian dan Pembangunan**

**a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**

Capaian kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dengan indikator laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian target yang ditetapkan sebanyak 11 dokumen terealisasi 11 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 63.68% dengan pagu sebesar Rp. 134.081.284,- terealisasi Rp. 85.387.003,-

Faktor pendorong:

1. Koordinasi dengan BUMD berjalan dengan baik
2. Adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak ketiga lainnya
3. Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

Faktor Penghambat:

1. Laporan pelaksanaan operasional dan keuangan BUMD sering terlambat
2. Kurangnya koordinasi antar OPD terutama dalam pelaporan kegiatan pengendalian inflasi

**(1) Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD target yang ditetapkan sebanyak 4 dokumen atau terealisasi 4 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran 44,04% dengan pagu sebesar Rp. 72.258.900,- terealisasi Rp. 31.819.963

Faktor pendorong:

Koordinasi dengan BUMD berjalan dengan baik

Faktor Penghambat:

Laporan pelaksanaan operasional dan keuangan BUMD sering terlambat

## (2) **Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah laporan hasil perencanaan dan distribusi perekonomian ditetapkan target sebanyak 7 laporan terealisasi sebanyak 7 laporan atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 86.65% dengan pagu anggaran Rp. 61.822.384,- terealisasi Rp. 53.567.040,-

Faktor pendorong:

1. Dukungan pemerintah pusat dalam regulasi koordinasi yang baik Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia Kpw.Babel serta OPD terkait
2. Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang merupakan pedoman untuk memberikan arahan pelaksanaan program TJSLP dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya koordinasi antar OPD terutama dalam pelaporan kegiatan pengendalian inflasi
2. Kurangnya anggaran OPD dalam pengendalian inflasi
3. Data CSR perusahaan dan data pembangunan yang memerlukan CSR belum sinkron.

## **b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**

Capaian kinerja kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan dengan indikator dokumen administrasi pembangunan ditetapkan target sebanyak 13 dokumen dan terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 87.66% dengan pagu anggaran Rp. 668.230.775,- terealisasi Rp. 585.763.762,-

Faktor pendorong:

1. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan
2. Terbentuknya tim fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

Faktor penghambat:

1. Belum tersedianya aplikasi pengendalian program
2. Belum seluruh Perangkat Daerah melaporkan data kegiatan pembangunan tepat waktu

**(1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Laporan dan terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 86.61% dengan pagu anggaran Rp. 595.705.000,- terealisasi Rp. 515.926.806,-

Faktor pendorong:

1. Terbentuknya tim fasilitasi/pendampingan pengendalian pembangunan daerah
2. Koordinasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah

Faktor penghambat:

Tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

**(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan target yang ditetapkan sebanyak 12 laporan dan terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 96.29% dengan pagu sebesar Rp. 72.525.775,- terealisasi Rp. 69.836.956,-

Faktor pendorong:

1. Adanya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah
2. Terbentuknya tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran

Faktor penghambat:

Belum seluruh Perangkat Daerah melaporkan data evaluasi pembangunan tepat waktu

**c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Capaian kinerja kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan indikator dokumen pengelolaan barang dan jasa sebanyak ditetapkan target sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 85.36% dengan pagu anggaran Rp. 2.336.994.264,- terealisasi Rp. 1.994.878.968,-

Faktor pendorong:

1. Peningkatan belanja PDN dalam pengadaan barang dan jasa
2. Seluruh pengadaan barang/jasa terintegrasi dan dilaksanakan secara elektronik
3. Terbentuknya Tim Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Belitung
4. Level kematangan/maturitas UKPBJ level 3 (proaktif)

Faktor penghambat:

1. Masih terdapat perangkat daerah yang kurang dalam penerapan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Masih adanya perangkat daerah yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

3. Pelaksanakan pengadaan barang dan jasa secara E-procurement belum maksimal
4. Belum terpenuhinya formasi fungsional pengadaan barang dan jasa

**(1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 88.75% dengan pagu anggaran Rp. 332.277.325 terealisasi Rp. 294.884.225,-

Faktor pendorong:

1. Kepatuhan dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
2. Seluruh pengadaan barang/jasa terintegrasi dan dilaksanakan secara elektronik
3. Peningkatan belanja PDN dalam pengadaan barang dan jasa
4. Kenyamanan pelaku pengadaan dalam berkonsultasi di UKPBJ kabupaten Belitung terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Faktor penghambat:

1. Masih kurangnya tingkat kepatuhan OPD dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi System Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
2. Terdapat beberapa OPD tidak berhasil dalam menarik RKAD Tahun 2024. Kegagalan ini disebabkan ketidaksesuaian nama dan kode satker yang ada pada aplikasi SIPD RI dengan SiRUP.
3. Masih ada OPD yang belum melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (masih manual)
4. Kurangnya produk UMKM masuk dalam E-Katalog Lokal Kabupaten Belitung

**(2) Sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik target yang ditetapkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 96.48% dengan pagu anggaran Rp. 413.683.139,- terealisasi Rp. 399.123.514,-

Faktor pendorong:

1. Kepatuhan dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
2. Seluruh pengadaan barang/jasa terintegrasi dan dilaksanakan secara elektronik

3. Peningkatan belanja PDN dalam pengadaan barang dan jasa
4. Kenyamanan pelaku pengadaan dalam berkonsultasi di LPSE Kabupaten Belitung

Faktor penghambat:

1. Terdapat beberapa OPD tidak berhasil dalam menarik RKAD Tahun 2024. Kegagalan ini disebabkan ketidaksesuaian nama dan kode satker yang ada pada aplikasi SIPD RI dengan SiRUP.
2. Gagal dalam pembaharuan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Selalu ada pembaharuan versi SPSE, akan tetapi Admin PPE selalu gagal dalam melakukan pembaharuan versi menggunakan Java Installation Manager (JaIM). JaIM merupakan sistem manajemen untuk proses pembaharuan aplikasi SPSE yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Pengembangan Secara Elektronik – LKPP.
3. Kurangnya produk UMKM masuk dalam E-Katalog Lokal Kabupaten Belitung

### **(3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang Dan Jasa**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa ditetapkan target 350 orang teralisasi 416 orang atau 100%. Capaian realisasi anggaran 81,76% dengan pagu anggaran Rp. 1.591.033.800,- terealisasi Rp. 1.300.871.229,-

Faktor pendorong:

1. Terbentuknya Tim Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Belitung
2. Level kematangan/maturitas UKPBJ level 3 (proaktif)
3. Pembinaan kepada pelaku pengadaan sesuai kebutuhan dan roadmap yang telah ditetapkan

Faktor penghambat:

1. Belum terpenuhinya formasi fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan
2. Advokasi pengadaan barang dan jasa belum optimal
3. Masih harus mencapai level kematangan/maturitas UKPBJ menjadi level 4 (strategis)

#### **d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**

Capaian kinerja kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam dengan indikator dokumen hasil kebijakan sumber daya alam target yang ditetapkan 2 dokumen terealisasi 2 dokumen atau 100%. Capaian realisasi anggaran sebesar 81.32% dengan pagu Rp. 109.109.020,- terealisasi Rp. 88.724.515,-

Faktor pendorong:

1. Adanya penyaluran gas LPG melalui Serasa (Saluran Elpiji Rakyat Melalui Desa) sehingga lebih tepat sasaran
2. Koordinasi dengan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berjalann dengan baik

Faktor penghambat:

1. Pelaporan dari agen gas LPG sering terlambat
2. Kurangnya koordinasi dengan provinsi terkait data kelautan dan perikanan

**(1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja ditetapkan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%. Capaian realisasi keuanga sebesar 81.87% dengan pagu anggaran Rp. 53.162.270,- terealisasi Rp. 43.522.860,-

Faktor pendorong:

Koordinasi dengan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berjalann dengan baik

Faktor penghambat:

Kurangnya koordinasi dengan provinsi terkait data kelautan dan perikanan

**(2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air**

Capaian kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan ditetapkan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%. Capaian realisasi keuanga sebesar 81.87% dengan pagu anggaran Rp. 53.162.270,- terealisasi Rp. 43.522.860,-

Faktor pendorong:

Pelaksanaan penyaluran gas LPG melalui Serasa (Saluran Elpiji Rakyat Melalui Desa) sehingga lebih tepat sasaran

Faktor penghambat:

Pelaporan dari agen gas LPG sering terlambat

**Tabel II.24**  
**Permasalahan dan Solusi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya mengatasi permasalahan</b>
Sekretariat Daerah	Penyampaian Rancangan Produk Hukum Daerah (Perbup dan Perda) dari OPD pemrakarsa melebihi waktu tanggal target penyampaian	Percepatan pelaksanaan kegiatan harmonisasi produk hukum daerah sesuai waktu target penyampaian
	kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada bagian hukum khususnya bagian perundang-undangan	Peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek maupun diklat dan penambahan SDM
	Masih terdapat yayasan/lembaga yang menerima dana hibah Kabupaten Belitung tahun 2023 mengembalikan sisa Anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada saat pelaporan akhir kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagian kesra setda kabupaten belitung akan melakukan evaluasi ulang terhadap hambatan yang terjadi pada yayasan/lembaga tersebut</li> <li>▪ Melakukan pembinaan terhadap pertanggung jawaban di akhir pelaporan yayasan/lembaga.</li> <li>▪ Melakukan sosialisasi tentang juknis dan juklak pelaksanaan Bantuan Hibah kepada yayasan/Lembaga Penerima bantuan hibah</li> </ul>
	Advokasi pengadaan barang dan jasa belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi/bimtek/workshop kepada pelaku pengadaan</li> <li>▪ Mengoptimalkan kinerja clearing house kabupaten Belitung</li> <li>▪ Melakukan konsultasi advokasi Pemerintah Daerah ke LKPP RI</li> </ul>



## II.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis merupakan kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

**Tabel II.25**  
**Kebijakan Strategis**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai aturan
2	Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Biaya Pendidikan Masyarakat Belitung	Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Masyarakat Belitung, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Masyarakat Belitung	Agar setiap siswa dan mahasiswa yang berprestasi di Kabupaten Belitung mendapatkan kesempatan untuk mendapat beasiswa pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia di Kab. Belitung
3	Kebijakan Penataan Organisasi dan Pengelolaan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Peraturan Bupati Belitung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Penataan Organisasi dan Pengelolaan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
4	Kebijakan Penataan Organisasi dan Pengelolaan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Penataan Organisasi dan Pengelolaan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung	
5	Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Adanya pedoman dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
6	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Peningkatan budaya berkinerja tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
7	Penataan Tata Laksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8	Kebijakan Penataan Organisasi dan Pengelolaan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung	Penataan Organisasi dan Pengelolaan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
9	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung	Pedoman untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
10	Penggunaan Air Bersih/Minum dari Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Batu Mentas	Surat Edaran Bupati Belitung Nomor 500/003/IV/2023 tentang Penggunaan Air Bersih/Minum dari Perusahaan air Minum Daerah Tirta Batu Mentas	Pengoptimalan Pemakaian Instalasi Pengolahan Air Batu Mentas yang bersumber dari embung Air Gunung Batu Mentas
11	Himbauan penjualan Gas LPG 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg di Kabupaten Belitung	Surat Edaran Nomor 500/213/IV/2023 tentang Himbauann Penjualan Gas LPG 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg di Kabupaten Belitung	Menjaga ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat dalam menggunakan LPG 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg di Kabupaten Belitung
12	Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi	Surat Edaran Bupati Belitung nomor: 027/343.a/VI/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui E-Purchasing	Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023	
13	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Regsosek dan Sensus Pertanian 2023	Surat Edaran Bupati Belitung Nomor 500/410/IV/2023 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Regsosek dan Sensus Pertanian 2023	Percepatan dan kelancaran pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Registrasi Sosial Ekonomi (FKP-Regsosek)
14	Pembentukan Kelompok Kerja Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/001/KEP/III/2023 Tentang Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Belitung pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023	Percepatan dan Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023
15	Penetapan Proyek Prioritas Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/002.A/KEP/V/2023 tentang Penetapan Proyek Prioritas Daerah (PPD) Kabupaten Belitung Tahun 2023	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan pembangunan Proyek Prioritas Daerah (PPD)
16	Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/045A/KEP/III/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023	Percepatan dan Kelancaran dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023
17	Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/084/KEP/III/2023 tentang Tim Pendamping Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	Percepatan dan Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
18	Penunjukan Kuasa Hukum Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/090/KEP/III/2023 tentang Penunjukan Kuasa Hukum Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun	Percepatan dan Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	Anggaran 2023 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	
19	Pembentukan Tim Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Belitung Tahun 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/128/KEP/2023 tentang Pembentukan Tim Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Belitung Tahun 2023	Percepatan dan Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Distribusi Persekonomian khususnya dibidang pelaksanaan pogram TJSLP/CSR di Kabupaten Belitung Tahun 2023
20	Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/137/KEP/VIII/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022
21	Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Ketersediaan Data Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/153A/KEP/IV/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Ketersediaan Data Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023	Percepatan dan Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
22	Pembentukan Tim Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pendistribusian LIQUEFILED PETROLEUM Gas Tabung 2 (tiga) Kilogram Kabupaten Belitung Tahun 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/159A/KEP/IV/2023 tentang Pembentukan Tim Pendampingan, Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Pendistribusian LIQUEFIELD PETROLEUM Gas Tabungan 2 (Tiga) Kilogram Kabupaten Belitung Tahun 2023	Percepatan dan Kelancaran dalam kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
23	Pembentukan Tim Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik daerah dan Badan layanan Umum Daerah Kabupaten Belitung	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/229/KEP/2023 tentang Pembentukan Tim Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Percepatan dan Kelancaran pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Perusahaan Kabupaten Belitung Tahun 2023	
24	Pembentukan Panitia Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin Penduduk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/234/KEP/III/2023 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin Penduduk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023	Percepatan dan Kelancaran Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum yang telah ditunjuk dan berasal dari kelembagaan bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang merupakan penduduk Kabupaten Belitung
25	Pembentukan Tim Penyusun Kodifikasi Produk Hukum Daerah Tahun 2022 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/299/KEP/III/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kodifikasi Produk Hukum Daerah Tahun 2022 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023	Percepatan dan Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Kodifikasi Produk Hukum Daerah Tahun 2022
26	Pembentukan Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024 Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/308/KEP/VIII/2023 tentang Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024	Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024
27	Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/309/KEP/VIII/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023	Terlaksananya rencana kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023
28	Penetapan Desa/ Kelurahan Binaan di Kabupaten Belitung Tahun 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/390/KEP/III/2023 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Belitung Tahun 2023	Penetapan Desa/ Kelurahan Binaan di Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
29	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/424/KEP/VIII/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerinta	Tersusunnya Peraturan Bupati Belitung Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
30	Pembentukan Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/441/KEP/VIII/2023 tentang Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024	Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024
31	Pembentukan Tim Transformasi Manajemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/437/KEP/VIII/2023 tentang Pembentukan Tim Transformasi Manajemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat
32	Penetapan Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/491/KEP/VIII/2023 tentang Penetapan Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka mengumpulkan data kinerja yang spesifik dan terukur
33	Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/534/KEP/VIII/2023 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2023	Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2023 yang berkualitas dan tepat waktu
34	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/624/KEP/IV/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023	Percepatan dan Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian khususnya di bidang Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023
35	Pembentukan Tim Panitia Seleksi Pemilihan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah	Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/629/KEP/IV/2023	Percepatan dan Kelancaran perekrutan pelamar pada Seleksi Pemilihan Direksi



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Belitong Mandiri periode 2024-2028	tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri Periode 2024-2028	Perusahaan Perseroan daerah Belitong Mandiri Kabupaten Belitong periode Tahun 2024-2028 pada pada kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
36	Penetapan Tunjangan Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batu Mentas	Keputusan Bupati Belitong nomor 100.3.4/640/KEP/IV/2023 tentang Penetapan Tunjangan jabatan Direktur Perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Batu Mentas	Peningkatan Pengelolaan dan perkembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batu Mentas
37	Pembentukan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri Kabupaten Belitong Periode 2024-2028	Keputusan Bupati Belitong Nomor 100.3.4/652/KEP/IV/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Belitong Mandiri Kabupaten Belitong Periode 2024-2028	Percepatan dan Kelancaran uji kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri pada kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
38	Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Belitong pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Tahun 2023	Keputusan Bupati Belitong Nomor: 100.3.4/667/KEP/III/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitong Nomor: 100.3.4/045A/KEP/III/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Belitong pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Tahun 2023	Percepatan dan Kelancaran dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Belitong
39	Penetapan Pemuka Agama Kabupaten Belitong	Keputusan Bupati Belitong Nomor: 100.3.4/701/KEP/II/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitong Nomor: 100.3.4/427/KEP/II/2023 tentang Penetapan Pemuka Agama Kabupaten,	Optimalisasi pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemuka agama di Kabupaten Belitong

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se-Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023	

## II.5 Penghargaan

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 mendapatkan penghargaan sebagai berikut:

**Tabel II.26**  
**Penghargaan Yang Diraih Perangkat Daerah Tahun 2023**

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Bagian Penerima Penghargaan
1	Penghargaan Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Belitung
2	Penghargaan Predikat Kategori Eka Acalapati dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2022	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Belitung
3	Nominasi TPID Kabupaten kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Belitung
4	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggraan Pelayanan Pubik	Ombudsman Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Belitung
5	Kepatuhan harmonisasi dan Kerjasama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Kabupaten Belitung
6	Anugerah Rekor Batu Granit Terbesar Berbentuk Kepala Burung Garuda	Museum Rekor Indonesia (MURI)	Pemerintah Kabupaten Belitung
7	Pemimpin terpopuler di media pemberitaan online pada ajang The 1st Indonesia GPR Award (IGA) 2023	Presiden Indonesia	Bupati Belitung
8	Pemimpin berdampak di Media Digital Tahun 2023 pada Award The 2 <sup>nd</sup> Indonesia DEI & ESG (IDEAS) 2023	Presiden Indonesia	Bupati Belitung



**BAB III**  
**TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BELITUNG**  
**TERHADAP LAPORAN KETERANGANPERTANGGUNGJAWABAN**  
**BUPATI BELITUNG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

DPRD Kabupaten Belitung melalui panitia khusus DPRD Kabupaten Belitung, melakukan pembahasan materi LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2022. Hasil pembahasan Pansus tersebut ditetapkanpr sebagai Keputusan DPRD Kabupaten Belitung tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung atas LKPJ Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2022. Rekomendasi berupa catatan strategis disampaikan kepada Bupati Belitung melalui Rapat Paripurna untuk dijadikan pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Tabel III.1**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Belitung**  
**Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022**

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan Anggaran)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Bagian hukum Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoodinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut Bagian Hukum harus dapat memastikanbahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan pada aturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan pengaturan mengenai pedoman setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan guna mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan kaedah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan pengaturan mengenai pedoman setiap tahapan pembentukan produk hukum

2	<p>Menginventarisir Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangannya untuk dilakukan peninjauan dan penyesuaian serta menginventarisir Peraturan Daerah yang belum ada peraturan pelaksanaan atau peraturan petunjuk teknisnya untuk dilakukan percepatan penyusunannya sesuai dengan amanat Perda, agar implementasi Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Belitung lebih maksimal dalam penerapannya dan tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaannya.</p>	<p>1. Melakukan inventarisasi dan mengusulkan perda yang tidak relevan untuk dilakukan Revisi/Perubahan atau pencabutan Peraturan daerah yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangannya untuk dilakukan peninjauan dan penyesuaian ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)</p> <p>2. Dalam rangka membuat peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah Kabupaten Belitung yang sudah ada Pemerintah Kabupaten Belitung saat ini telah melakukan upaya percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan atas Peraturan daerah yang telah di undangkan, dengan penetapan skala prioritas penyusunan Peraturan Bupati melalui Program Pembentukan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p>	<p>Diundangkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai aspirasi masyarakat dan rencana pembangunan daerah</p>
3	<p>Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan <i>Omnibus law</i> yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor terutama sektor perkebunan terkait permasalahan kepemilikan lahan dan status penggunaan lahan antara lahan milik perusahaan-perusahaan perkebunan dan lahan perkebunan milik masyarakat setempat. hal ini menjadi pemicu terjadinya sengketa lahan yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan perusahaan dan masyarakat setempat saling berseberangan dan konflik tanpa penyelesaian. untuk itu perlu dilakukan mediasi secara periodik dengan terus menggiring perusahaan dan masyarakat untuk saling berkontribusi dan menciptakan iklim yang kondusif dengan memberikan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat sehingga kedua</p>	<p>Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sudah menganggarkan dalam sub kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p>	<p>Bagian pemerintahan telah memfasilitasi kegiatan penyelesaian sengketa atas pengaduan yang diajukan oleh masyarakat</p>

<p>belah pihak tidak saling merugikan</p> <p>Solusi:</p> <p>Perlu adanya langkah komprehensif dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan tentang penyesuaian peraturan iklim investasi dan permasalahan pada sektor perkebunan terutama terkait lahan hak guna usaha perkebunan dan lahan milil masyarakat setempat yang hingga saat ini masih terus menjasi polemik.</p> <p>Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam upaya melakukan penyelesaian dalam konflik lahan tersebut diantaranya:</p> <p>Mediasi periodik untuk selalu melakukan koordinasi dan kinsultasi rutin dengan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Pertanian., Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Kehutanan untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan dimaksud</p> <p>b. Forum Discussion Group atau Forum Grup Diskusi yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk saling berupaya menyelesaikan dalam tahap demi tahap dengan mengundang Narasumber dari Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Perhutanan untuk berdiskusi memberikan alternatif penyelesaian permasalahan lahan tersebut agar didapatkan kepastian hukum tentang kepemilikan lahan dan hak guna usaha pada lahan yang dimaksud</p> <p>c. Lain-lain berkenaan dengan penyesuaian dan perubahan peraturan-peraturan yang</p>		
--	--	--

	mengatur tentang Lahan Hak Guna Usaha Perkebunan.		
4	Penambahan dalam program kegiatan pemberian Bea Siswa ke Perguruan Tinggi melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Belitung dapat lebih diperbanyak dan lebih beragam, terutama untuk fasilitasi siswa-siswi yang kurang mampu yang berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka meningkatkan fasilitasi siswa-siswi untuk mengenyam jenjang pendidikan di perguruan tinggi, pada Tahun 2023 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut Pemerintah Daerah sudah melanjutkan dan menyelesaikan program Beasiswa Penuh yang bekerjasama dengan Institut Agama Islam Tazkia, Universitas Agung Podomoro dan Universitas Sampoerna</li> <li>2. Pemerintah Daerah melaksanakan kesepakatan/kerjasama baru sebagai berikut :a) Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk Program Studi Kedokteran sebanyak 2 (dua) Orang b) Kerjasama dengan Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan perincian 20 (duapuluh) orang Beasiswa Pemerintah Kab. Belitung dan 10 (sepuluh) orang Beasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor untuk program studi Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Lingkungan, Rekayasa Pertanian dan Biosistemc. Memberikan Beasiswa Parsial (Non Permanen) kepada mahasiswa berprestasi sebanyak 50 (lima puluh) orang masing-masing Rp. 10.000.000</li> </ol>	Agar setiap siswa dan mahasiswa yang berprestasi di Kabupaten Belitung mendapatkan kesempatan untuk mendapat beasiswa pendidikan ke perguruan tinggi.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk tugas pembantuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belitung memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Belitung yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Belitung membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Kabupaten Belitung pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk **“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”**.